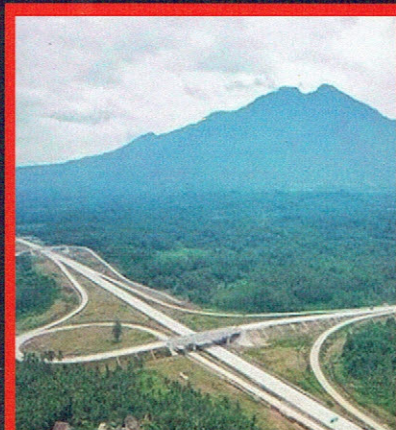
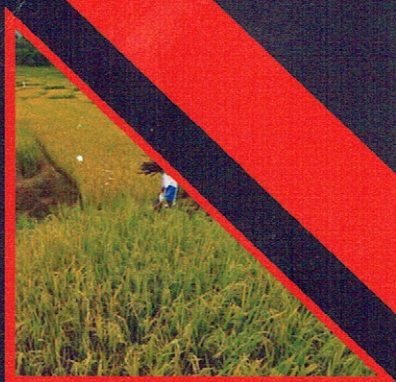




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2019-2024

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat rahmat serta hidayah-Nya akhirnya dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 ini berhasil diselesaikan. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan arahan (*guide line*) bagi segenap pimpinan dan staf pelaksana BAPPEDA dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam penyusunan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung. Adapun tujuannya untuk meningkatkan kontribusi BAPPEDA dalam penjaminan mutu perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan yang dihasilkan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, berkelanjutan dan terintegrasi. Selain itu, dokumen ini juga ditujukan untuk mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakan BAPPEDA selama lima tahun ke depan.

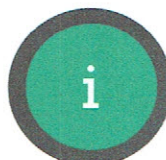
Demikian, semoga dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan **Rakyat Lampung Berjaya.**

KEPALA BAPPEDA,

Ir. MULYADI IRSAN, M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011





RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Provinsi Lampung dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan nya menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 tetap menggunakan 1 Tujuan, 3 Sasaran, 5 Indikator Kinerja Utama. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 antara lain 3 Program, 15 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan. Pembagian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Utama I **“Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah”** dengan indikator sebagai berikut:

- ✚ Indikator “Penetapan RKPD Tepat Waktu”. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan;
- ✚ Indikator “Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD”. Indikator ini dicapai melalui usulan stakeholder yang diakomodir dalam aplikasi E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung;

Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada sasaran utama 1 adalah 1 Program, 4 Kegiatan dan 13 Sub kegiatan.



2. Sasaran Utama II “**Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah**” dengan indikator sebagai berikut :

- ✚ Indikator “Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD”. Indikator ini dicapai melalui tingkat keselarasan indikator sasaran Renstra OPD dengan indikator sasaran pada RPJMD 2019-2024;
- ✚ Indikator “Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD”. Indikator ini dicapai melalui tingkat keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran pada RKPD;
- ✚ Indikator “Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai”. Indikator ini dicapai melalui indikator kinerja utama Gubernur yang telah mencapai target yang ditetapkan pertahun nya.

Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada sasaran utama 2 adalah 1 Program, 3 Kegiatan dan 24 Sub kegiatan.

3. Sasaran Utama III ” **Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA** “ dengan Indikator Nilai Sakip BAPPEDA yang merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai tiap tahun.

Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada sasaran pendukung adalah 1 Program, 8 Kegiatan dan 21 Sub kegiatan.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirancang dalam Perubahan Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2024 menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam mewujudkan Visi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu “**RAKYAT LAMPUNG BERJAYA**”

Bandar Lampung, Januari 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	9
2.2 Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Lampung.....	15
2.4 Peluang Pengembangan dan Tantangan.....	27
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PD.....	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024.....	31
3.3 Telaahan Renstra Kementertian PPN/ Bappenas Tahun 2020-2024.....	35



3.4	Isu Strategis Perangkat Daerah.....	37
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD.....	38
4.1	Tujuan dan Sasaran dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	38
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan BAPPEDA Provinsi Lampung 2019-2024.....	42
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	45
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	45
5.2	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perubahan BAPPEDA Provinsi Lampung TA 2019-2024...	46
BAB VI.	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN.....	51
BAB VII.	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN..	58
BAB VIII.	PENUTUP.....	63
LAMPIRAN - LAMPIRAN		





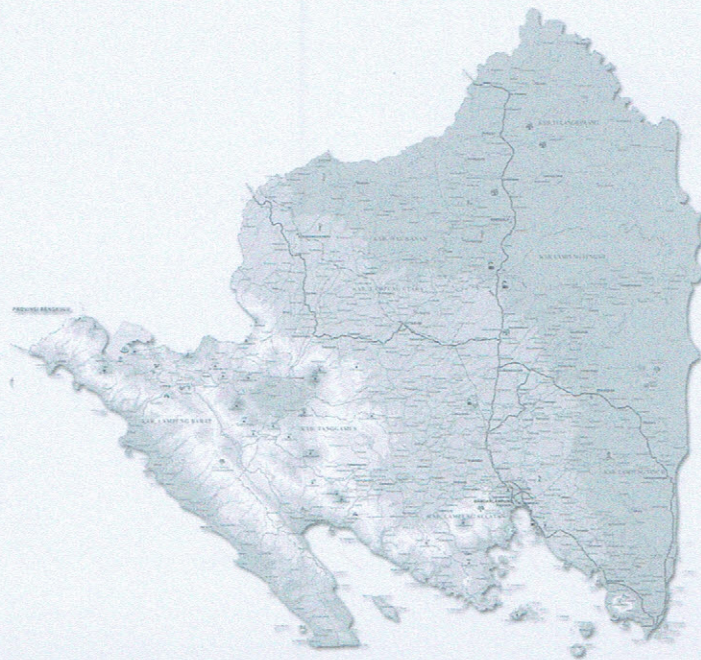
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin.....	12
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Pendukung di BAPPEDA.....	14
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, IKU dan Target Kinerja Sebelum.....	17
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA.....	25
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA	26
Tabel 3.1	Isu Strategis Perencanaan Pembangunan Prov. Lampung.	37
Tabel 4.1	Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	41
Tabel 4.2	Tujuan dan Indikator Kinerja Perubahan BAPPEDA.....	43
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	44
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Prov. Lampung...	46
Tabel 5.2	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung.....	46
Tabel 5.3	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BAPPEDA Prov. Lampung Tahun 2019-2024.....	49
Tabel 6.1	Ilustrasi Mapping Program dan Kegiatan dari Permendagri 13 Tahun 2006 ke Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.....	51
Tabel 7.1	Perubahan Indikator Kinerja Pembangunan BAPPEDA Prov. Lampung sesuai bidang urusan yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung.....	59
Tabel 7.2	Cara Perhitungan Capaian Target Indikator Kinerja Pembangunan BAPPEDA Provinsi Lampung sesuai bidang urusan yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung.....	60



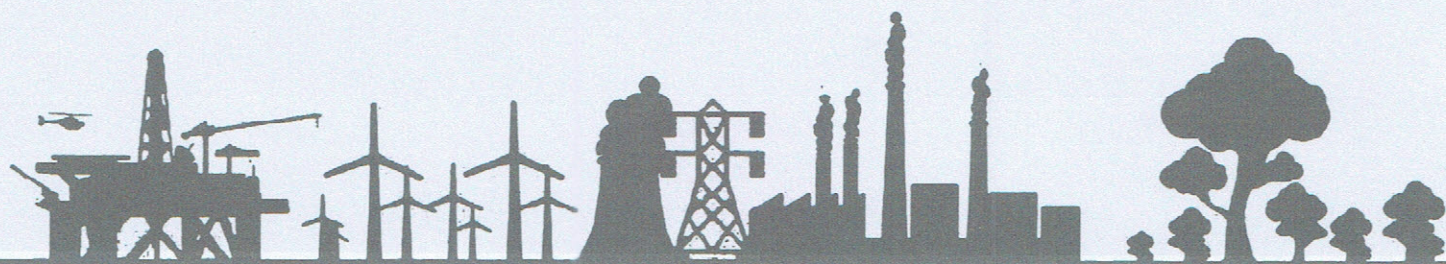
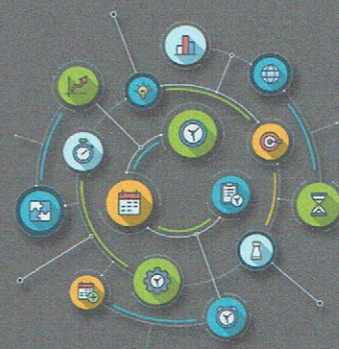
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Lampung.....	10
Gambar 2.2	Sarana dan Prasarana Pendukung di BAPPEDA.....	13
Gambar 2.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator BAPPEDA 2019-2024.....	16
Gambar 2.4	Pohon Kinerja BAPPEDA.....	18
Gambar 2.5	Capaian IKU Sasaran 1.....	19
Gambar 2.6	Capaian IKU Sasaran 2.....	21
Gambar 2.7	Capaian IKU Sasaran 3.....	23
Gambar 2.8	Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2020.....	24
Gambar 3.1	Cascading Visi s/d Tujuan dan Sasaran Bappenas.....	36
Gambar 4.1	Visi dan Misi Kepala Daerah.....	38
Gambar 4.2	Cascading P RPJMD s/d P Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2024.....	42
Gambar 5.1	Analisa SWOT.....	47
Gambar 6.1	Pohon Kinerja BAPPEDA Tahun 2019-2024 Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.....	56



BAB I. PENDAHULUAN

PERUBAHAN RENSTRA
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG 2019-2024





1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 272 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Provinsi Lampung telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2019-2024 yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Memperhatikan dinamika pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 maupun Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 sampai dengan akhir tahun 2020; terdapat beberapa kondisi lingkungan strategis yang menjadi dasar pertimbangan diperlukannya revisi terhadap dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 maupun dokumen Renstra Bappeda Tahun 2019-2024, antara lain :

- ✚ Terjadi perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenkelatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) maupun dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut;
- ✚ Dalam rangka mendukung keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyusunan strategi dan



arah kebijakan dokumen Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 perlu dipaduserasikan dengan dokumen Renstra Bappenas Tahun 2020-2024.

- ✚ Berawal dari masalah kesehatan, terjadinya pandemi Covid-19 diawal tahun 2020 telah membawa dampak yang meluas ke masalah sosial, masalah ekonomi, bahkan ke sektor keuangan; yang memerlukan penyesuaian strategi dan kebijakan rencana pembangunan beserta penyesuaian indikator maupun target dan kerangka pendanaan nya yang lebih realistis baik ditingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Dalam perkembangannya, sejak awal tahun tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan tahapan-proses Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan pada saat ini telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, Pasal 342 Ayat (4) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa “Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah”.

Untuk menjaga kesinambungan rencana pembangunan daerah, Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok Hasil Evaluasi pelaksanaan Renstra Bappeda tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pada tahun perencanaan ke depan. Selanjutnya, dalam rangka memelihara konsistensi dan sinergi pencapaian target pembangunan daerah, maka Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Bappeda Tahun 2019-2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renstra ini, adalah berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagaimana berikut:



1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi Tata Kerja Provinsi Lampung;



12. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara substansi, dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 memuat deskripsi tentang gambaran umum pelayanan perangkat daerah, capaian sasaran perangkat daerah tahun sebelumnya, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, sasaran, lokasi, indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju, berdasarkan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Seluruh uraian dalam Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menghasilkan kinerja perangkat daerah yang mendukung terwujudnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 adalah :

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
- 2) Memberikan arah dan pedoman kepada perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan berkontribusi dalam pencapaian visi-misi dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung;
- 3) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar jenjang pemerintahan;
- 4) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi tahapan dan mekanisme antara perencanaan dan penganggaran, dimana Renstra merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja dan perencanaan anggaran perangkat daerah;
- 5) Menyediakan instrument tolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Revisi Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas latar belakang Perubahan Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Perubahan RPJMD maupun Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat pokok tinjauan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah maupun perubahannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.



Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah.

2.2 Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Capaian Kinerja Periode Tahun Sebelumnya

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

2.4 Peluang Pengembangan dan Tantangan

Bagian ini mengemukakan tantangan dan peluang yang dapat dikembangkan oleh perangkat daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada stakeholder, yang didasarkan pada hasil capaian kinerja perangkat daerah pada masa lalu, kapasitas sumber daya internal, tinjauan regulasi, maupun arah kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan kebutuhan layanan dimasa mendatang.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



Bagian ini mengemukakan tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana telah diarahkan dalam RPJMD Provinsi Lampung.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Bagian ini mengemukakan tinjauan terhadap kebijakan rencana pembangunan di tingkat kementerian/lembaga guna mendorong terciptanya harmonisasi dengan rencana pembangunan di tingkat perangkat daerah.

3.4 Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini akan mengemukakan informasi tentang isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Bab IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung, yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Perubahan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung, yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perubahan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Pada bagian ini akan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup



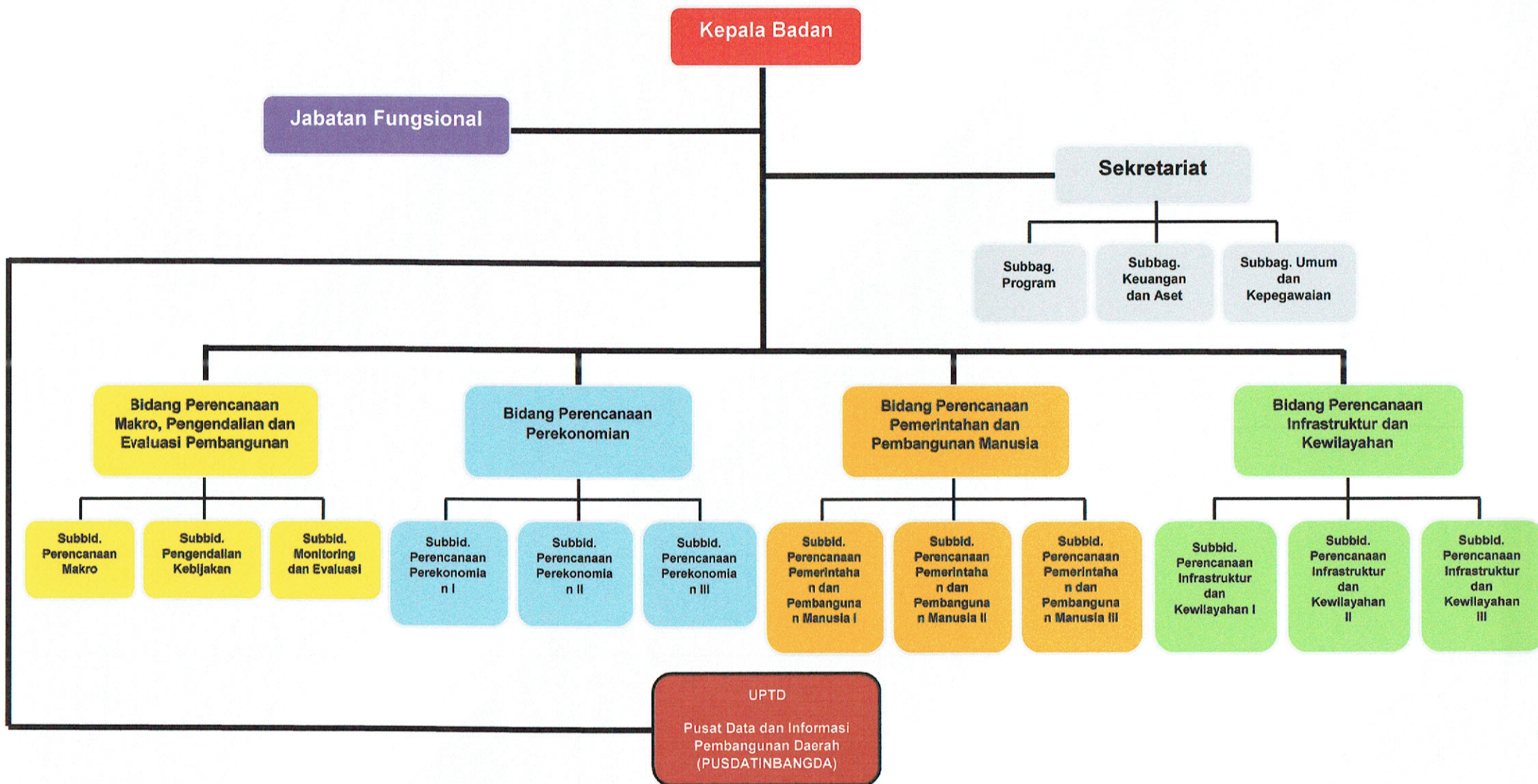
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 777 Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BAPPEDA menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. penyelenggaraan administrasi;
6. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
7. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Secara lengkap struktur organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana gambar di bawah ini :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Berdasarkan Pergub 56 Tahun 2019



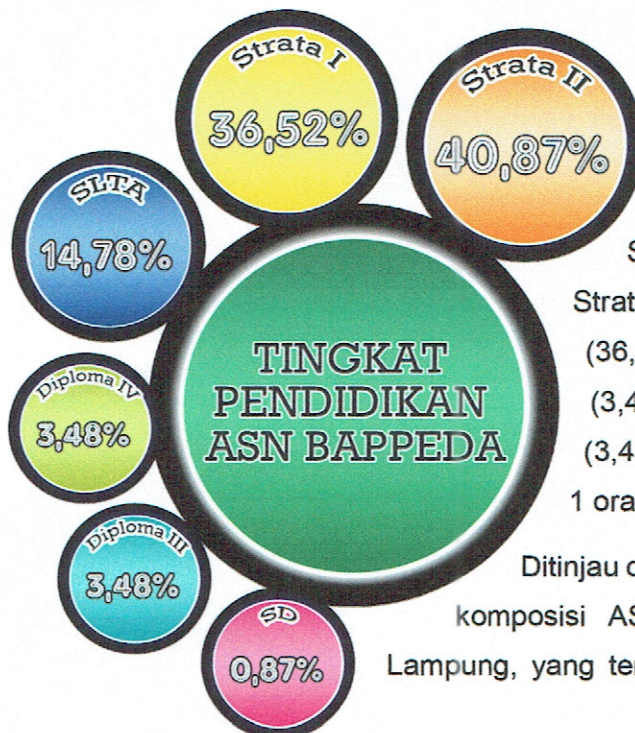
2.2 Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana

a. Kondisi Pegawai

Sumberdaya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Lampung terdiri dari 12 Jabatan Struktural dan , 13 Jabatan Fungsional Sub Koordinator, yaitu :

- Satu orang Kepala Badan, eselon II.a;
- Satu orang Sekretaris, eselon III.a;
- Empat orang Kepala Bidang, eselon III.a;
- Satu orang Kepala UPTD, eselon III.b;
- Lima orang Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, eselon IV.a; dan
- Tiga Belas orang Jabatan Fungsional Sub Koordinator

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BAPPEDA Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana berikut:



Berdasarkan diagram disamping ASN BAPPEDA pada Bulan Desember Tahun 2021 berjumlah 115 orang dengan kualifikasi jenjang pendidikan Strata II sebanyak 47 orang (40,87%), Strata I dengan jumlah ASN 41 orang (36,52%) , Diploma IV sebanyak 4 orang (3,48%), Diploma III sejumlah 4 orang (3,48%), SLTA 17 orang (14,78%), dan SD 1 orang (0,87 %).

Ditinjau dari jenjang kepangkatan dan golongan, komposisi ASN dilingkungan BAPPEDA Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, diikuti



dengan Golongan IV, Golongan II dan Golongan I dengan rincian sebagaimana pada Diagram berikut

Dari jumlah 115 orang, Golongan III berjumlah 79 orang atau persentase 68,70% dengan rincian Golongan III.d berjumlah 24 orang, Golongan III.c sebanyak 25 orang, Golongan III.b sebanyak 24 orang, dan Golongan III.a sebanyak 6 orang.

Sedangkan Golongan IV berjumlah 25 orang atau persentase 21,74% dengan rincian Golongan IV.d berjumlah 1 orang, Golongan IV.b sebanyak 6 orang, dan Golongan IV.a sebanyak 18 orang.

Untuk Golongan II berjumlah 10 orang atau persentase 8,70% dengan rincian Golongan II.d berjumlah 3 orang, Golongan II.c 3 orang, Golongan II.b 4 orang. Serta Golongan I berjumlah 1 orang atau persentase 0,87% dengan rincian Golongan I.d berjumlah 1 orang.

Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021, aparatur BAPPEDA Provinsi Lampung tercatat berjumlah 115 orang yang terdiri dari 12 orang pejabat struktural, 13 orang Sub Koordinator Sub Substansi, 24 orang Fungsional perencana, dan 66 orang pelaksana. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin

Nama Pejabat	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pejabat Struktural	7	5	12
Sub Koordinator Sub Substansi	8	5	13
Jabatan Fungsional Perencanaan	10	14	24
Fungsional Umum/Pelaksana	38	28	66
TOTAL	63	52	115
PERSENTASE	54,78%	45,22%	100





b. Sarana Pendukung

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di BAPPEDA Provinsi Lampung sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja, walaupun masih perlu ditingkatkan agar tugas-tugas dapat berjalan lebih cepat dan profesional.

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA sekaligus menunjang kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penyusutan/tidak lagi berfungsi secara optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung.



Gambar 2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan di BAPPEDA



Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung di BAPPEDA

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
1.	Gedung Kantor 3 Lt	-	-	-
2.	Ruang Rapat			
	- Ruang Rapat Lt. 1	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Lt. 1	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Lt. 3	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Kecil	-	-	6 Ruang
3.	Perpustakaan	-	-	1 Ruang
4.	Kendaraan Roda 4			
	- Fortuner	Toyota	2020	1 unit
	- Hi Lux	Toyota	2015	1 unit
	- Minibus/Rust	Toyota	2014	1 unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2014	1 unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2014	1 unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2004	1 unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2004	1 unit
	- Suzuki APV	Suzuki	2007	1 unit
5.	Kendaraan Roda 2			
	- Sepeda Motor	- Yamaha MX	2014	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda C. 100	1996	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda NF125 SD	2006	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda MCB	1997	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda GL MAX	1997	1 unit
	- Sepeda Motor	- Suzuki	2005	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda NF125 SD	2006	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda C.86	1996	1 unit
	- Sepeda Motor	- Yamaha RX-S	1996	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda C. 100	2002	1 unit
6.	Sarana Pendukung			
	- Komputer	Bermacam merk dan type		66 unit
	- Note Book	Bermacam merk dan type		51 unit
	- Printer	Bermacam merk dan type		70 unit
	- Camera	Bermacam merk dan type		15 unit
	- Handycam	Bermacam merk dan type		8 unit
	- LCD	Bermacam merk dan type		10 unit
	- Televisi	Bermacam merk dan type		20 unit
	- Sound System	Bermacam merk dan type		5 unit



NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
	- Wireless	Bermacam merk dan type		5 unit
	- Scanner	Bermacam merk dan type		6 unit
	- AC	Bermacam merk dan type		51 unit
	- GPS	Bermacam merk dan type		3 unit
	- Spinning Bike			1 unit
	- Treadmill			1 unit
	- Sit Up Bench			1 unit
	- Power Rider			1 unit
	- Tablet Note	Bermacam merk dan type		8 unit
	- Lemari Es	Bermacam merk dan type		unit

2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Lampung

a. Akuntabilitas Kinerja Beserta Indikatornya

Mengacu pada Visi **“Rakyat Lampung Berjaya”** dan 6 (enam) Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu *“Mewujudkan good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”* dengan Sasaran RPJMD yaitu *“Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”*.

Adapun cascading dari RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 hingga Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



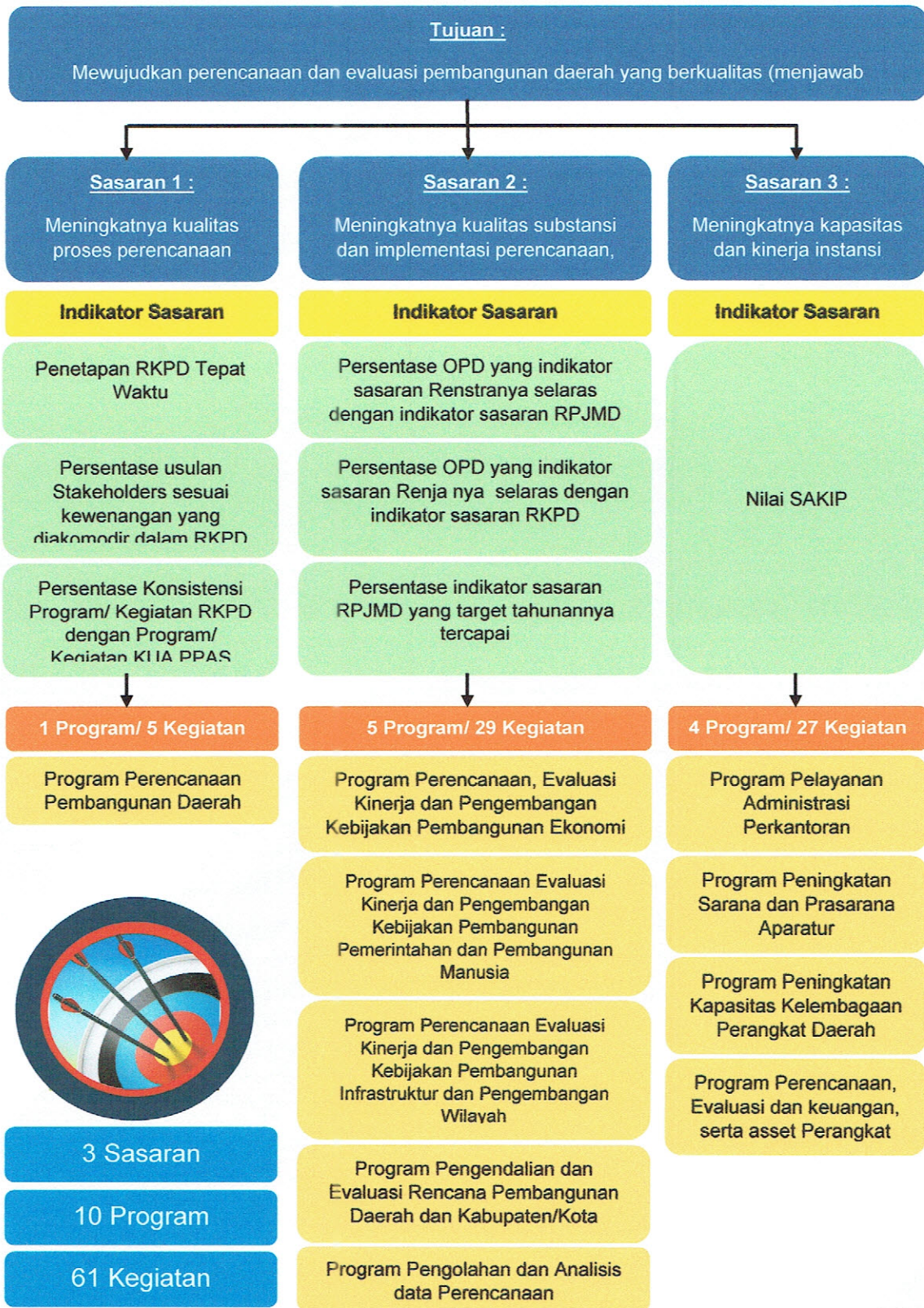
Gambar 2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator BAPPEDA 2019-2024

Dalam rangka menciptakan akuntabilitas kinerja pemerintah yang terukur, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dijabarkan pada Tabel berikut :



Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Sebelum Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Misi ke- 2: "Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik"								
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	30%	30%	31%	32%
			Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS.	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase OPD yang indikator sasarannya selaras dengan indikator sasaran RKPDP;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	80%	85%	90%	95%	95%
			Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	A



Gambar 2.4 Pohon Kinerja BAPPEDA



b. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2020

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 BAPPEDA melaksanakan **10 Program** dan **61 Kegiatan** dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. **25.308.524.140,-** yang terdiri dari : Belanja Tak Langsung (BTL) sebesar Rp. 12.717.544.190,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 12.590.979.950,- . Adapun, capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan realisasi keuangan pada tahun 2020 dirangkum sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah			
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	30 %	29,45 %	98,16
Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS	100 %	100 %	100
↓	↓	↓	↓
1 Program/ 5 Kegiatan	Pagu Program (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	854.675.000	635.425.500	74,35

Gambar 2.5 Capaian Kinerja IKU Sasaran 1



Indikator sasaran 1.a adalah Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2020.

Indikator sasaran 1.b adalah Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 29,45 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 98,16%. Usulan stakeholder ini diakomodir dalam aplikasi E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain: 1) Usulan Masyarakat; dan 2) Usulan Pokir DPRD

Indikator 1.c adalah Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS dengan target kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2020 Program yang terdapat pada RKPD yaitu berjumlah 385 Program dan Kegiatan berjumlah 3.628. Adapun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) seluruh Program dan Kegiatan konsisten dengan RKPD. Sehingga, realisasi capaian kinerja sasaran strategis 1.c sebesar 100%. Hal ini karena dalam penyusunan rencana tahun 2020 sudah menggunakan aplikasi E-RKPD untuk perencanaan serta aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (SIPPKD) untuk keuangan sehingga tidak dimungkinkan OPD memilih kegiatan diluar menu kegiatan yang sudah diinput di sistem informasi.



Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah			
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	100 %	81,25 %	81,25
Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD	100 %	81,25 %	81,25
Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	80 %	51,85 %	64,81
↓	↓	↓	↓
5 Program/ 29 Kegiatan	Pagu Program (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	1.483.898.200	775.158.150	52,24
Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.317.521.300	1.293.581.600	98,18
Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1.320.207.700	917.892.420	69,53
Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota	755.103.300	695.591.600	92,12
Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan	760.598.000	733.766.500	96,47

Gambar 2.6 Capaian Kinerja IKU Sasaran 2



Indikator sasaran 2.a adalah Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 100 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 100% dimana indikator sasaran Renstra OPD telah selaras dengan indikator sasaran pada RPJMD 2019-2024. Adapun realisasi nya adalah sebesar 81,25 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 81,25%. Capaian kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB RI pada Bulan Agustus Tahun 2020. Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat 9 OPD yang belum selaras indikator Renstranya terhadap RPJMD.

Indikator sasaran 2.b adalah Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 100 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 100% dimana indikator sasaran Renja OPD telah selaras dengan indikator sasaran pada RKPD. Adapun realisasi nya adalah sebesar 81,25 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 81,25% Capaian kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB RI pada Bulan Agustus Tahun 2020. Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat 9 OPD yang belum selaras indikator Renjanya terhadap RKPD 2021.

Indikator sasaran 2.c adalah Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 80% atau sebanyak 27 indikator dari 33 indikator yang ditargetkan mencapai 100%. Adapun realisasi nya sebesar 51,85 % dengan total indikator yang telah mencapai target berjumlah 14 Indikator sampai dengan Bulan April tahun 2021, sedangkan terdapat 13 indikator belum mencapai target yang direncanakan Sehingga, realisasi capaian kinerja sasaran strategis 2.c sebesar 64,81%.



Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA			
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Nilai SAKIP	BB	BB	100
↓	↓	↓	↓
4 Program/ 27 Kegiatan	Pagu Program (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.170.156.100	2.568.699.288	81,03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.767.427.750	1.692.218.433	95,74
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	410.423.200	280.508.700	68,35
Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat	750.969.400	670.467.450	89,28

Gambar 2.7 Capaian Kinerja IKU Sasaran 3

Indikator pendukung ini merupakan indikator rutin yang diukur melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPEDA dalam 1 tahun, Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi, keuangan serta asset. Target indikator ini merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2019 yaitu predikat “BB”. Adapun realisasi kinerjanya telah mencapai target 100 % karena hasil predikat tersebut akan didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing OPD pada Bulan Juli Tahun 2020.

Lebih lanjut, dengan telah ditetapkan Perda Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, BAPPEDA melaksanakan **10 Program** dan **61 Kegiatan** telah ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp. **25.308.524.140,-** yang terdiri dari : **Belanja Tak Langsung (BTL)** sebesar Rp. 12.717.544.190,- dan **Belanja Langsung (BL)** sebesar Rp. 12.590.979.950,-. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.8 Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2020

Dalam perjalanannya, baik dari sisi capaian keuangan dan capaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung dari tahun 2016-2020 mengalami 2 periode Renstra, yakni Renstra 2015-2019 dan Renstra 2019-2024. Adapun capaian keuangan dan kinerja pelayanan BAPPEDA dari tahun 2016-2020 dijelaskan pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- (%)					Realisasi Capaian Tahun ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)					(8)=(7/6*100)				
Tahun 2016-2019																			
1.	Persentase konsistensi Program RKPD dengan Program RPJMD	---	---	---	100	100	100	100	---	100	100	100	100	---	100	100	100	100	---
2.	Persentase konsistensi Program KUA PPAS dengan Program RKPDP	---	---	---	95	100	100	100	---	95	100	100	100	---	100	100	100	100	---
3.	Persentase Kesesuaian antara Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Prioritas Pemerintah Provinsi Lampung	---	---	---	95	100	100	100	---	95	100	100	100	---	100	100	100	100	---
4.	Persentase analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan	---	---	---	95	100	100	100	---	95	100	100	100	---	100	100	100	100	---
5.	Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	---	---	---	80	90	100	100	---	80	93,75	100	100	---	100	104,22	100	100	---
6.	Persentase disiplin kehadiran dan kinerja ASN	---	---	---	92,5	95	97,5	100	---	90,39	94,74	96,19	95,63	---	97,72	99,72	98,62	95,63	---
7.	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	---	---	---	70	80	90	100	---	70	80	90	96,83	---	100	100	100	96,83	---
Tahun 2020																			
1.	Penetapan RKPDP Tepat Waktu	---	---	---	---	---	---	---	Tepat Waktu	---	---	---	---	Tepat Waktu	---	---	---	---	100
2.	Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPDP;	---	---	---	---	---	---	---	30	---	---	---	---	29,45	---	---	---	---	98,16
3.	Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPDP dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS;	---	---	---	---	---	---	100	---	---	---	---	---	100	---	---	---	---	100
4.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	---	---	---	---	---	---	100	---	---	---	---	---	81,25	---	---	---	---	81,25
5.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPDP;	---	---	---	---	---	---	100	---	---	---	---	---	81,25	---	---	---	---	81,25
6.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	---	---	---	---	---	---	80	---	---	---	---	---	51,85	---	---	---	---	64,81
7.	Nilai SAKIP	---	---	---	---	---	---	BB	---	---	---	---	---	BB	---	---	---	---	100



Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (000)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TAHUN 2016-2019																	
Belanja Tidak Langsung	13.303.505	15.071.156	14.830.771	12.936.163		10.816.218	14.887.186	14.337.494	11.825.019		83,83	96,22	94,83	86,48		111.465.772	100.644.576
Belanja Langsung																	
TAHUN 2020																	
Belanja Operasi					31.982.150					29.252.044					91,46	31.982.150	29.252.044



2.4 Peluang Pengembangan dan Tantangan Pelayanan Daerah

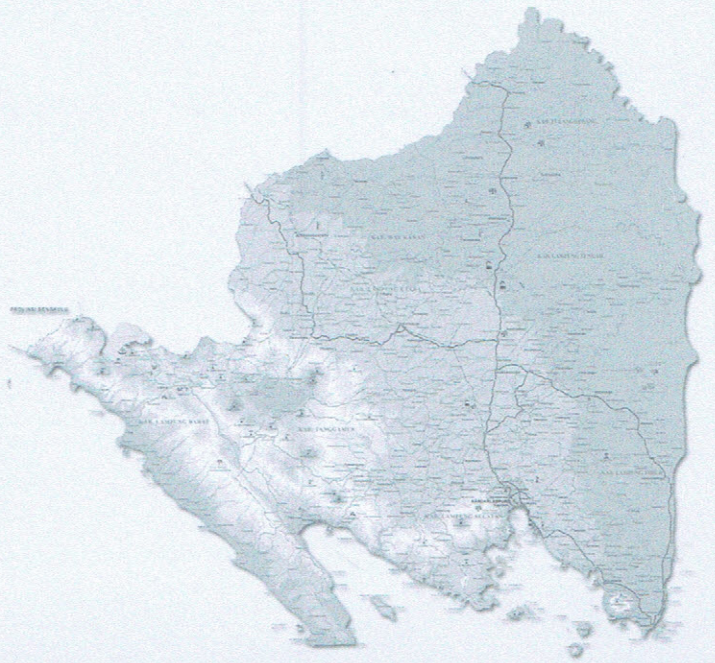
BAPPEDA Provinsi Lampung mempunyai beragam potensi yang dapat menjadi faktor penguat yang merupakan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 telah mempertegas posisi BAPPEDA sebagai koordinator seluruh perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah serta memberikan kontribusi strategis dalam pembangunan daerah kepada Gubernur.
2. BAPPEDA sebagai perangkat daerah dengan tugas dan fungsi perumusan perencanaan pembangunan, mempunyai sumber daya manusia yang mampu tanggap terhadap perubahan lingkungan strategis pembangunan yang semakin kompleks dan tidak terprediksi termasuk dampak bencana alam dan non-alam (seperti pandemi penyakit menular Covid-19) diantaranya dengan: (i) bertindak sebagai pemberi informasi dan rekomendasi hasil pembangunan kepada Gubernur dan pihak terkait dalam pemerintahan; dan (ii) memberikan sistem peringatan dini atas isu-isu strategis di tingkat daerah dan nasional yang membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tepat.
3. BAPPEDA sebagai jembatan penyeimbang pusat-daerah dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimungkinkan dengan adanya fungsi pengendalian pembangunan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sehingga pemantauan, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berjenjang dan berkala yang hasilnya dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan sasaran dan pelaksanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien.
4. Kompetensi dan kemampuan pegawai BAPPEDA telah cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas dan sinergis.



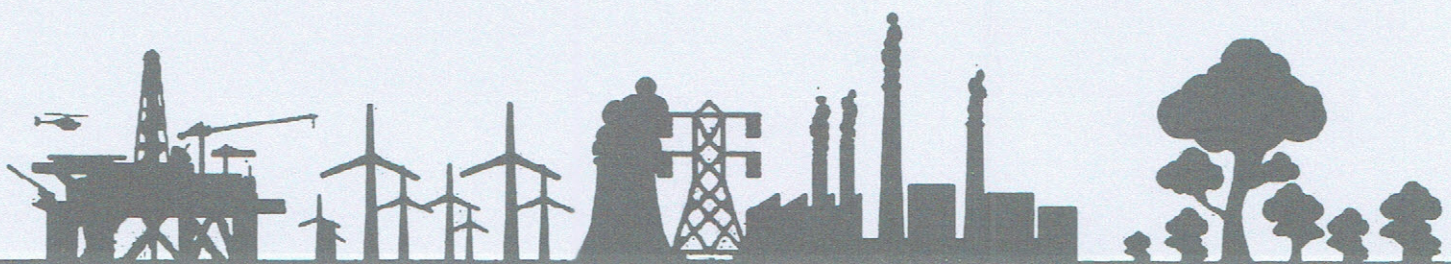
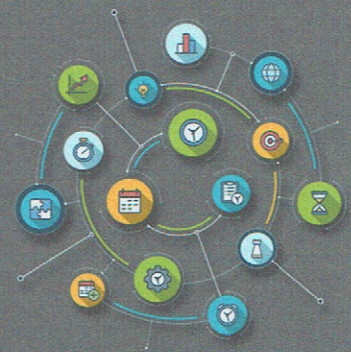
Disaat yang bersamaan, dalam rangka mengembangkan kualitas pelayanan perangkat daerah, BAPPEDA masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. BAPPEDA memiliki jaringan koordinasi luas baik dengan mitra kerja ditingkat pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi) maupun dengan mitra pembangunan internasional ; perlu memperkuat SDM dan kelembagaan menjadi *think tank* pemerintah daerah yang menghasilkan analisis dan kajian yang dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan berbasis fakta (*evidence-based planning*) serta menghasilkan kebijakan inovatif dan terobosan dalam tahap pembangunan selanjutnya.
2. BAPPEDA mengemban amanat dari pimpinan daerah harus dapat bertindak sebagai *clearing house* perencanaan, yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah memiliki keselarasan dalam pencapaian prioritas sasaran pembangunan daerah dan nasional
3. Keberadaan Jabatan Fungsional Perencana pada berbagai jenjang keahlian harus dapat memperkuat peran BAPPEDA sebagai *think-tank* melalui penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan penelitian (*research based policy*);
4. Kemampuan BAPPEDA dalam mengkoordinasikan pengelolaan Data dan Informasi pembangunan masih membutuhkan peningkatan kualitas yang lebih optimal guna mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia dengan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG 2019-2024





3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Merujuk pada tugas dan fungsi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019; disatu sisi, pelaksanaan program dan kegiatan di BAPPEDA Provinsi Lampung secara umum diarahkan untuk mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Disisi yang lain, Bappeda sebagai perangkat daerah juga melaksanakan fungsi pelayanan secara internal di tingkat perangkat daerah, maupun fungsi pelayanan secara eksternal yang akan dimanfaatkan oleh stake holder terkait.

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil. Penyebab dari permasalahan tersebut adalah:

- Rencana pembangunan jangka menengah belum optimal dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan.
- Rencana pembangunan belum optimal mempertimbangkan standar pelayanan minimal, kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non-alam, keberlanjutan lingkungan, industry 4.0 dan ekonomi digital, termasuk penanganan dampak pandemi penyakit menular (Covid-19).
- Belum optimalnya dukungan perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran kinerja (IKU) pemerintah daerah; Agenda Kerja Daerah, ataupun Prioritas Nasional (PN) serta program pengembangan wilayah secara berkesinambungan ;
- Terdapat indikasi tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan antar perangkat daerah, ataupun antar jenjang pemerintahan (K/L di pusat, pemkab/pemkot) dan kurang optimalnya kontribusi kinerja perangkat daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah maupun nasional;
- Sumber-sumber pendanaan Non APBD dan Non APBN belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan;



- Belum optimalnya kesiapan (*Readiness Criteria*) dari pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN) di daerah;
- Tingkat kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan pembangunan dalam melaksanakannya secara efektif dan efisien;
- Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah maupun nasional;
- Proses perencanaan masih belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi sesuai dengan tujuan dan Prinsip Satu Data Indonesia;
- Koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 belum berjalan optimal.
- Kualifikasi, kompetensi dan kinerja SDM perencana yang belum memadai dalam mendukung tercapainya sasaran kinerja (IKU) Bappeda.

2. Permasalahan Pengelolaan Dukungan Manajemen internal di Bappeda meliputi:

- Masih kuatnya budaya yaitu masing-masing unit kerja berdiri sendiri dibanding bekerja secara terintegrasi antar unit dalam struktur organisasi
- Minimnya *Standard Operasional dan Prosedur* (SOP) tata kelola koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan lintas perangkat daerah, termasuk hubungan perencanaan pemprov-pemerintah pusat, ataupun pemprov-pemkab/kota .



- Unit-unit Bappeda belum mengimplementasikan proses monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana secara tersistem untuk mengimbangi tugas perencanaan.
- Kurang optimalnya kualitas layanan umum, pelayanan layanan data dan informasi kepada pemangku kepentingan.
- Belum adanya SOP yang mengatur hubungan dan peran yang jelas antara Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional Perencana yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan mekanisme hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional perencana.
- Belum adanya mekanisme layanan yang baku untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan terutama Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang), pertemuan antar pihak (multilateral), maupun musrenbang.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi belum SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Bound*) dan terstruktur (*tercascading*) secara individu.
- Masih lemahnya manajemen pengelolaan SDM yang ditunjukkan oleh (i) belum diterapkannya hasil analisis potensi SDM sehingga penempatan sumber daya manusia masih belum sepenuhnya sesuai latar belakang pendidikan dan keahlian; (iii) belum tercukupinya jumlah PNS yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja Bappeda, dan/atau belum dioptimalkannya ASN yang ada.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor peng-hambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024.



Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, adalah :



Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata.

Visi "**Rakyat Lampung Berjaya**" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a) Kehidupan masyarakat yang **aman**. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja;
- b) Kehidupan masyarakat yang **berbudaya**. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan;



- c) Kehidupan masyarakat yang **maju dan berdaya saing**. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global;
- d) Kehidupan yang **sejahtera**. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, sebagai berikut :

- a. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
- b. Misi-2: Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- c. Misi-3: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum disabilitas.
- d. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
- e. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
- f. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 tersebut ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan, yaitu :

1. Kehidupan Religius dan berbudaya



2. Reformasi Birokrasi
3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (pemerataan)
6. Peningkatan nilai tambah pertanian untuk penanggulangan kemiskinan
7. Pembangunan Berkelanjutan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Lampung tersebut, maka BAPPEDA sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Lampung selama lima tahun ke depan. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan BAPPEDA dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Lampung antara lain :

- a. Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;
- b. Kompetensi pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana;
- c. Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;
- d. Sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan BAPPEDA dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Lampung antara lain :

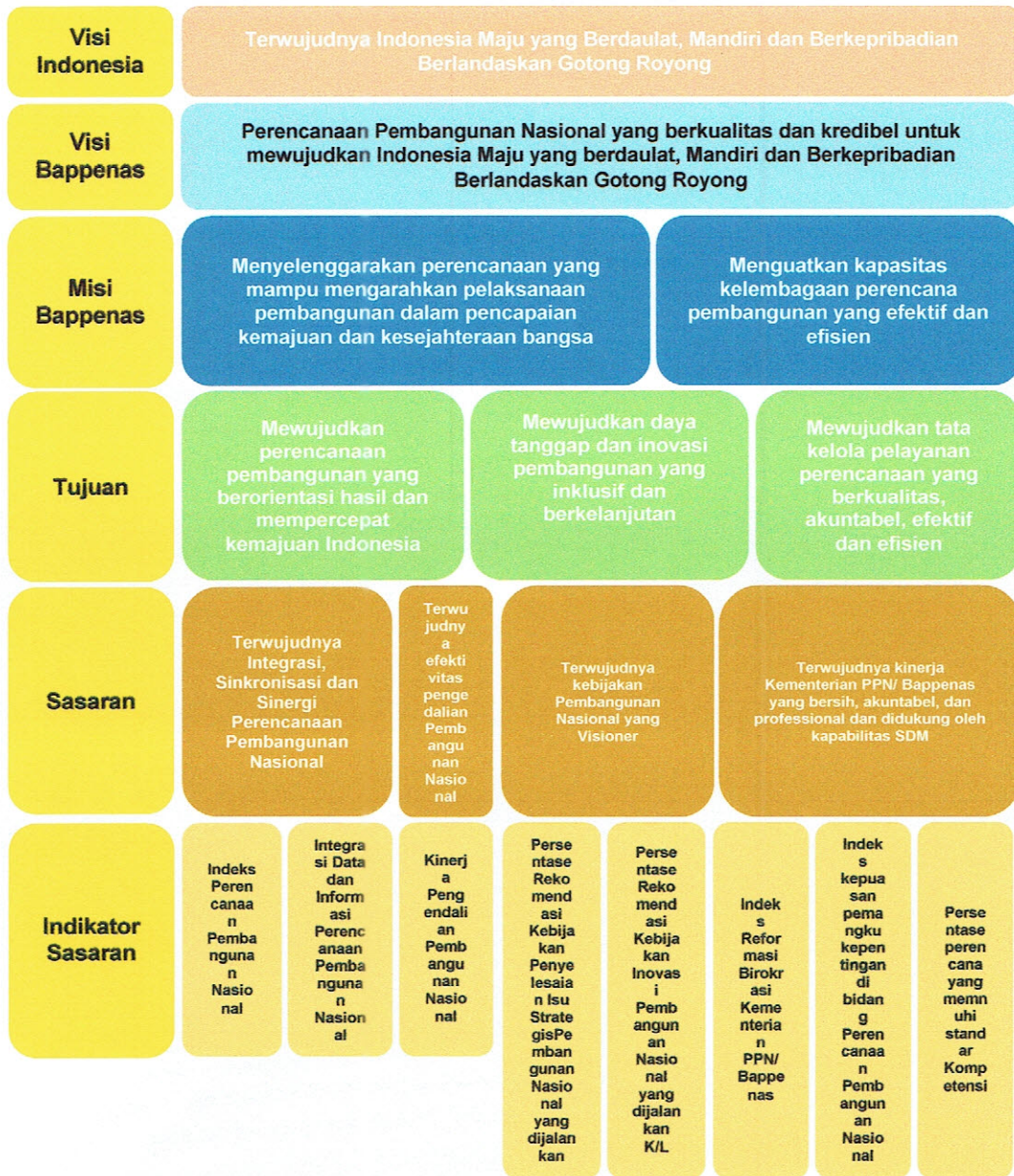
- a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
- c. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;



- d. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
- e. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
- f. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- g. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
- h. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;
- i. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.

3.3 Telaahan Renstra Kementertian PPN/ Bappenas Tahun 2020-2024

Guna mewujudkan sinergi pembangunan antarjenjang pemerintahan, penyusunan Renstra Bappeda diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas, sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta mendukung tujuan dan sasaran Renstra Bappenas 2019-2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, maka kebijakan pembangunan dan ukuran kinerja yang ditempuh oleh Bappenas Tahun 2020-2024 dirangkum sebagai berikut:



Gambar 3.1 Cascading Visi s/d Tujuan dan Sasaran Bappenas

Proses pengintegrasian tujuan, sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintah pusat ke provinsi melalui upaya koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan merupakan rangkaian untuk menyelaraskan gerak dan langkah dalam mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah juga tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh



pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi diharapkan lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang lebih tinggi. Lebih lanjut, koordinasi oleh semua unsur terkait termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengetahui kesesuaian antara proses pembangunan dan perencanaan, serta pelaksanaan evaluasi sebagai dasar perencanaan pembangunan pada tahap selanjutnya.

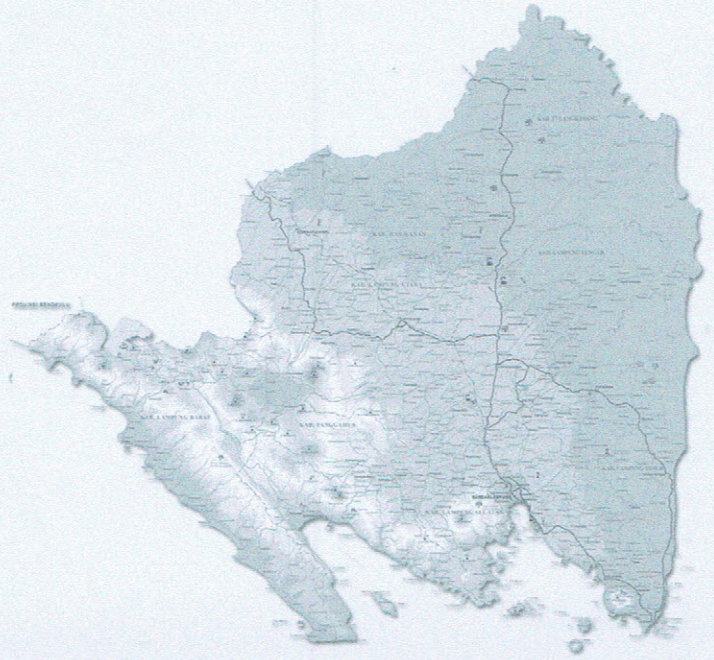
3.4 Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

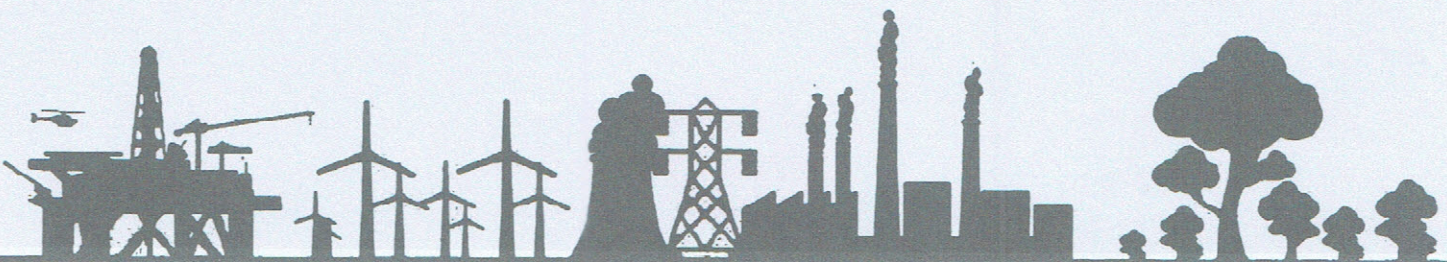
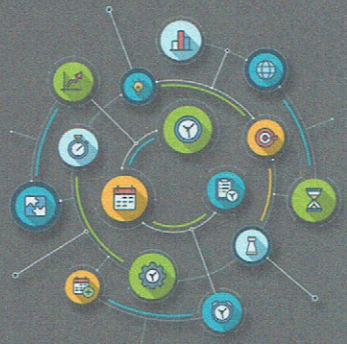
Tabel 3.1 Isu Strategis Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung

No.	Aspek	Isu Strategis
1.	Kualitas Dokumen Perencanaan	a. Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan
		b. Terwujudnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
		c. Sinkronisasi dokumen pusat dan daerah
		d. Implementasi pendekatan perencanaan yang holistik, Integarl, tematik dan Spasial (HITS)
		e. Terwujudnya sinergi provinsi dan kabupaten/kota
		f. Mengintegrasikan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi ke dalam perencanaan
2.	Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi	a. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada belum memenuhi standar manajemen mutu untuk mendukung tercapainya Reformasi Birokrasi.
		b. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
		c. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

PERUBAHAN RENSTRA
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG 2019-2024





4.1 Tujuan dan Sasaran dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Dalam memperhatikan Visi “Rakyat Lampung Berjaya” yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diharapkan Masyarakat Lampung menjadi *subyek utama* dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Maka disusunlah misi sebagai bentuk penjabaran Visi yang dicita-citakan antara lain :



Gambar 4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah



Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik. Yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Salah satu latar belakang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yakni adanya pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi COVID-19 ditandai dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan output di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran.

Dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah bersama dengan seluruh Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu refocusing dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net).

Mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran.



Berdasarkan permasalahan yang terjadi serta isu-isu strategis di Provinsi Lampung, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 mengalami penyesuaian dari 7 (tujuh) tujuan, 13 (tiga belas) indikator tujuan, 23 (dua puluh tiga) sasaran dan 33 (tiga puluh tiga) indikator sasaran berubah 8 (delapan) tujuan, 13 (tiga belas) indikator tujuan, 18 (delapan belas) sasaran dan 18 (delapan belas) indikator sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Perubahan yang terjadi terhadap tujuan dan sasaran khususnya Misi ke 2 yang merupakan integrasi ke Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2019-2024 tergambar pada tabel berikut:



Tabel 4.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

RPJMD AWAL				PERUBAHAN RPJMD				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi II : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik								
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)	Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK/WTP (Opini)					
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					



4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan BAPPEDA Provinsi Lampung 2019-2024

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2019-2024, BAPPEDA Provinsi Lampung menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung. Sasaran merupakan penjabaran tujuan. Sasaran harus mempunyai indikator sasaran dengan target yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tahunan.



Gambar 4.2 Cascading P RPJMD s/d P Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2024



Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2019- 2024, adalah :

Tabel 4.2 Tujuan dan Indikator Kinerja Perubahan BAPPEDA

No.	Tujuan	Indikator kinerja	Target (2024)
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Penetapan RKPD Tepat Waktu;	Tepat Waktu
		Persentase Usulan <i>Stakeholders</i> sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	32%
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	95%
		Nilai SAKIP Bappeda	A

Mengacu pada Visi Misi tersebut, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu ***“Mewujudkan “good govemance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”*** dengan Sasaran RPJMD yaitu ***“Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi”***.



Tujuan yang ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mencapai visi misi Provinsi Lampung ditunjukkan pada tabel berikut :

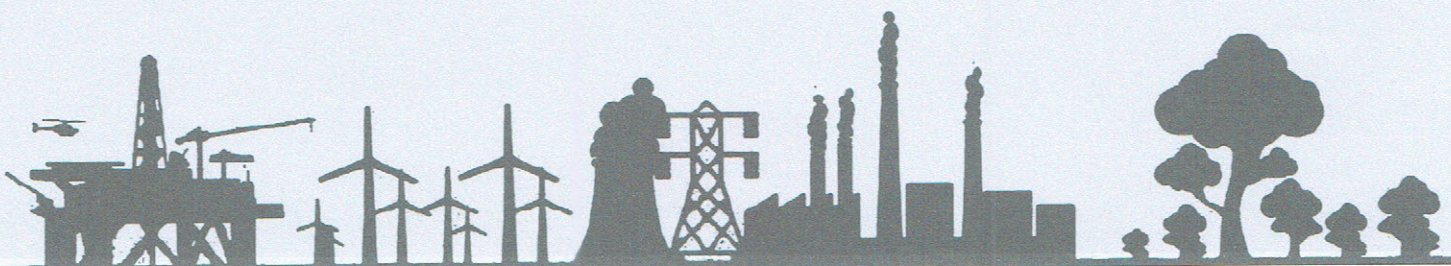
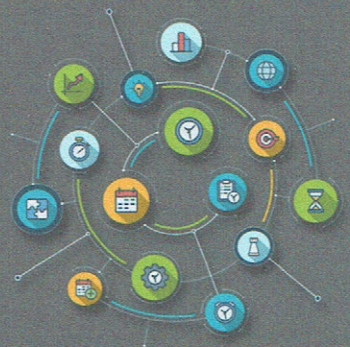
**Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

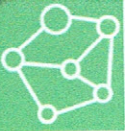
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
RPJMD Provinsi Lampung								
<ul style="list-style-type: none"> ✦ Misi ke- 2: "Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik" ✦ Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ✦ Sasaran : Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi ✦ Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi 								
RENSTRA OPD								
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPd Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPd	30%	30%	30%	31%	32%
		Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPd;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	80%	85%	90%	95%	95%
Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP Bappeda	BB	BB	BB	A	A		



BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PERUBAHAN RENSTRA
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG 2019-2024





5.1 Strategi dan Arah Kebijakan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan dan langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Perumusan strategi disusun dengan memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sedangkan Arah Kebijakan Pembangunan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang ada, dirumuskan strategi untuk pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung pada Misi II disajikan pada Tabel dibawah ini:



Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Lampung

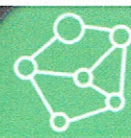
Visi : Rakyat Lampung Berjaya		
Misi II : Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi	2.1 Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik
		2.2 Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui peningkatan kualitas manajemen SDM ASN

Tabel 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung

ARAH KEBIJAKAN				
2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Kualitas SDM dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan	Melanjutkan Peningkatan Kualitas SDM dan Pembangunan Ekonomi dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan	Memantapkan SDM Berkualitas dan Perekonomian yang Berdaya Saing, dengan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Memperkokoh Perekonomian untuk Produktivitas dan Daya Saing yang Tinggi	Memantapkan Kemajuan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Dukungan SDM yang Inovatif

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perubahan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan akan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Sementara itu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran menjadi arah kebijakan, karena hal tersebut akan dijadikan pedoman atau



petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan BAPPEDA.

Strategi dan kebijakan BAPPEDA merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BAPPEDA guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan BAPPEDA, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.



Gambar 5.1 Analisa SWOT

FAKTOR INTERNAL

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi BAPPEDA yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja BAPPEDA, antara lain :



- Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;
- Kompetensi pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana;
- Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;
- Sarana dan prasarana kerja yang memadai.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan BAPPEDA yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja BAPPEDA, antara lain :

- Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
- Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi.

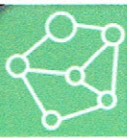
FAKTOR EKSTERNAL

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja BAPPEDA yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja BAPPEDA, antara lain :

- Kewenangan dan peran BAPPEDA yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Terbuka peluang untuk kerjasama dengan Stakeholder pembangunan/dunia usaha.



- Berkembangnya kemajuan teknologi yang semakin cepat untuk memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja BAPPEDA, antara lain :

- Adanya inkonsistensi Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Perencanaan;
- Perencanaan masih bersifat Sektoral;
- Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Perangkat Daerah lain;
- Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil rencana pembangunan dalam bentuk riil

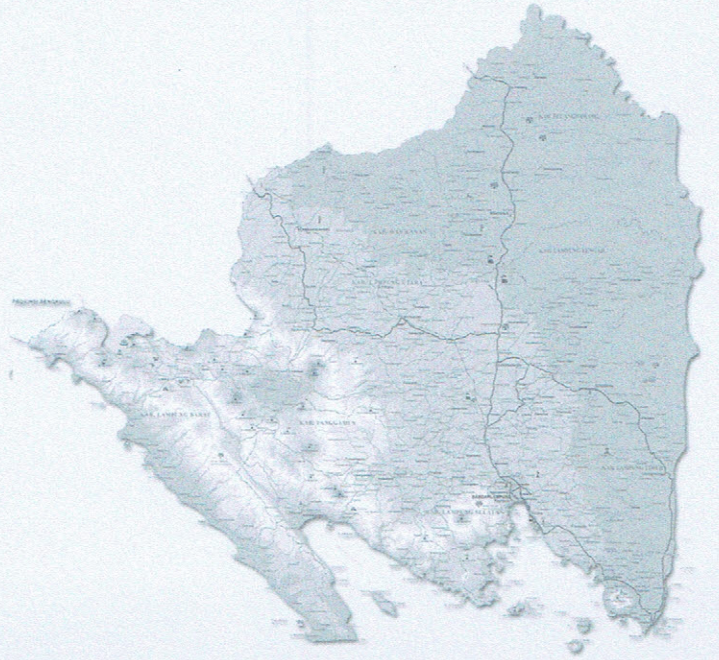
Strategi dan kebijakan BAPPEDA Provinsi Lampung dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel dibawah ini:

Tabel 5.3 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

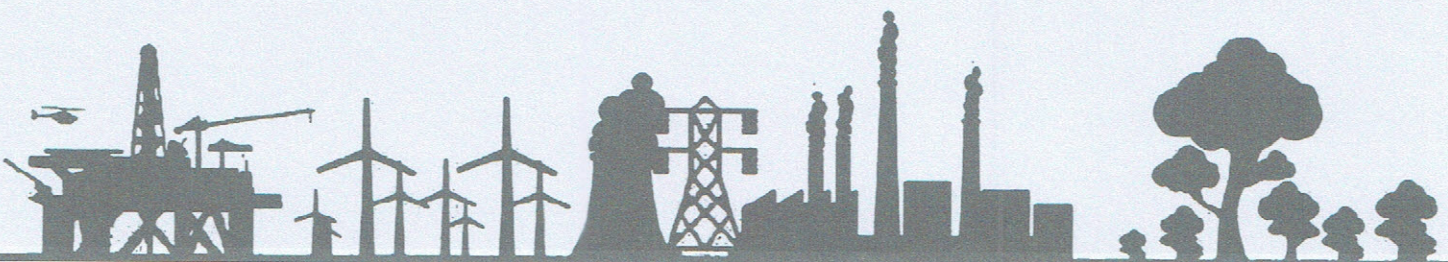
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	1. Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas melalui penguatan koordinasi antar berbagai sektor pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/kota dan pusat • Meningkatkan koordinasi internal dengan PD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung
		2. Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Peningkatan capaian pelaksanaan pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi antar berbagai sektor pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kajian/analisis kebijakan sektoral • Meningkatkan koordinasi internal pelaksanaan program dengan PD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembnagunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah
			Pengembangan pemanfaatan informasi berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan data dan informasi dengan fokus pada data dan informasi Spasial
		Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan layanan sarana dan prasarana penunjang perkantoran yang tepat guna • Meningkatkan kompetensi SDM yang lebih berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dukungan administrasi perkantoran • Peningkatan dukungan Sarpras • Peningkatan kapasitas SDM • Penyusunan program dan kegiatan BAPPEDA berbasis kinerja



**BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN
PERUBAHAN RENSTRA
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG 2019-2024**



Dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka penyusunan nomenkelatur program kegiatan dan sub kegiatan di Bappeda mengacu pada Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diuraikan di atas, Bappeda melaksanakan **3 program dan 15 Kegiatan yang tersebar pada 58 Sub Kegiatan**. Maka BAPPEDA Provinsi Lampung menetapkan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2019-2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.1 Ilustrasi Mapping Program dan Kegiatan dari Permendagri 13 Tahun 2006 ke Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020

NO (1)	PROGRAM/ KEGIATAN PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (2)	NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 (3)	KETERANGAN (4)
I	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	I	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
1.	Pembinaan Perencanaan Perangkat Daerah	1.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
2.	Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	2.	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	
3.	Penyusunan dan Penetapan RKPD	3.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	
4.	Penyusunan dan Penetapan RPJPD dan RPJMD			
II	Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan	II	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	Pengolahan dan Analisis Data Informasi Perencanaan	4.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
6.	Pengolahan dan Analisis Data Geospasial Untuk Perencanaan	5.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	
7.	Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional	6.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM/ KEGIATAN PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020	KETERANGAN
(1)	(2)		(3)	(4)
8.	Pengembangan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung	7.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	
9.	Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan			
III	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota	III	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
10.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat	8.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	
11.	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD	9.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
12.	Evaluasi Capaian Kinerja RPJPD, RPJMD dan RKPD	10.	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	
13.	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten/Kota			
		IV	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
		11.	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
		12.	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
		13.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	
IV	Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	V	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
14.	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pemerintahan	14.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		15.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
15.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Pemerintahan	16.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
16.	Pilot Project Pembangunan "Smart Village"			
17.	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	17.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
18.	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Manusia	18.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	



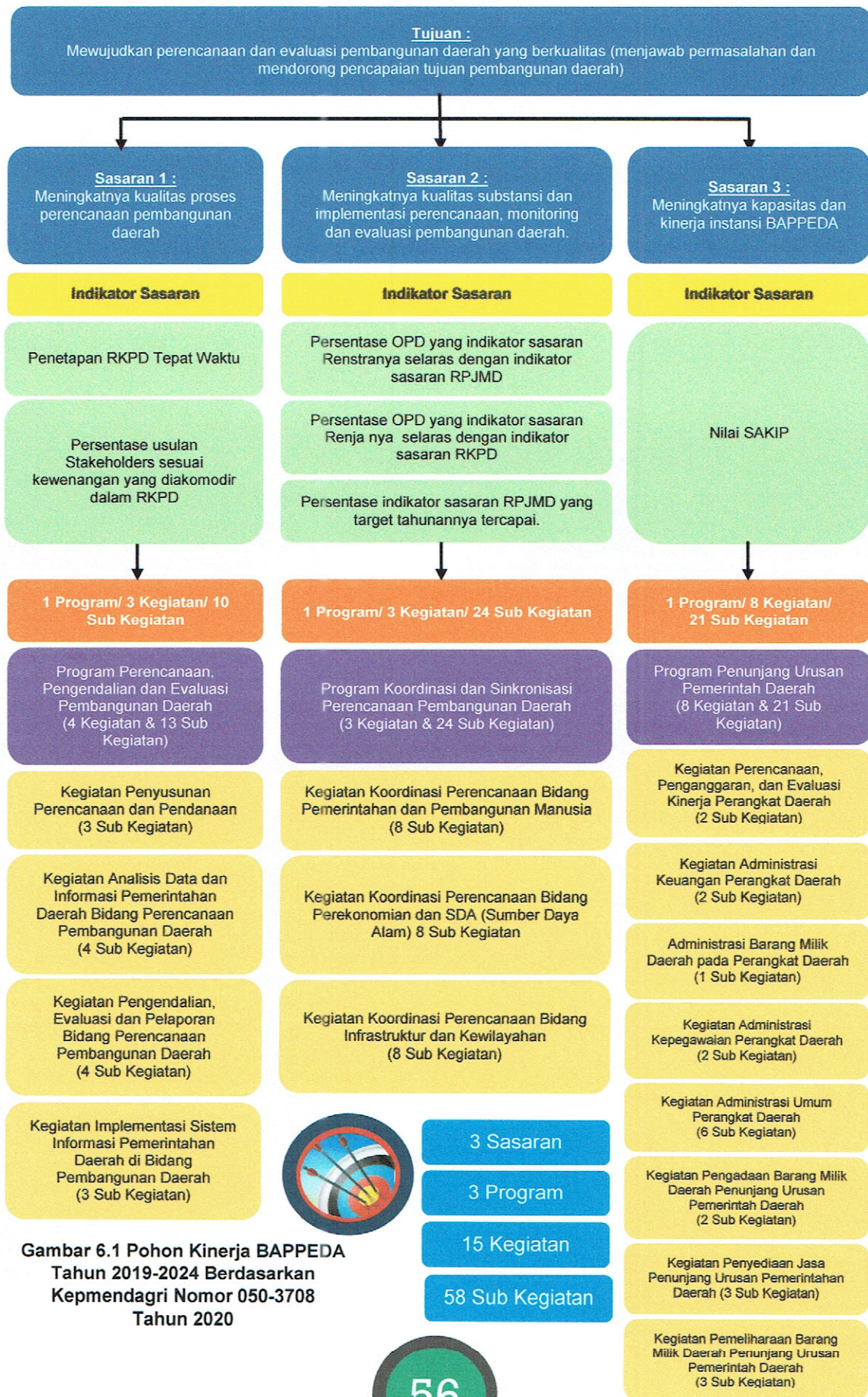
NO	PROGRAM/ KEGIATAN PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020	KETERANGAN
(1)	(2)		(3)	(4)
			Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		19.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
19.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	20.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
20.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Sumberdaya Manusia	21.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
V	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	VI	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
21.	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Investasi dan Keuangan	22.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
22.	Koordinasi Regional Pembangunan Antar Wilayah Provinsi	23.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
23.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Ekonomi Makro, Investasi dan Keuangan	24.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
24.	Perencanaan Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Industri, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan UKM	25.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
25.	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pertanian	26.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		27.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
26.	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Pertanian	28.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
27.	Pilot Project Pemberdayaan Masyarakat Miskin (PEMM) dan Kartu Petani Berjaya (KPB)			
28.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Industri Perdagangan dan Pariwisata	29.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
VI	Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan	VII	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	



NO	PROGRAM/ KEGIATAN PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020	KETERANGAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			
29.	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur	30.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	
30.	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan SDA dan LH	31.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
31.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Infrastruktur	32.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
32.	Penunjang Program IPDMIP (Integrated Participacy Developmnet And Management Irrigation Project)	33.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
33.	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman	34.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	
		35.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
34.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman	36.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
35.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan SDA dan LH	37.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
VII	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	VIII	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
36.	Penyusunan dokumen perencanaan	38.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
37.	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	39.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		IX	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		40.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
38.	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	41.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
		X	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
39.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	42.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
VIII	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	XI	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
40.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	43.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	



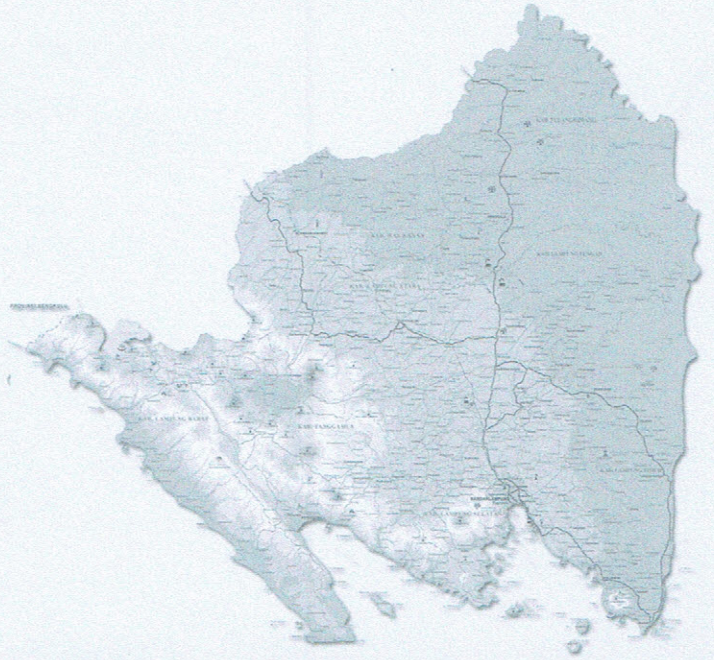
NO	PROGRAM/ KEGIATAN PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020	KETERANGAN
(1)	(2)		(3)	(4)
41.	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	44.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
42.	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur			
IX	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	XII	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
43.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
44.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	46.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
45.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
46.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
47.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.	Penyediaan Bahan/Material	
48.	Penyediaan Makanan dan Minuman	49.	Fasilitas Kunjungan Tamu	
49.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
X	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	XIII	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
50.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	51.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
51.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	52.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		XIV	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
52.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
53.	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	54.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
54.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	55.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
55.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			
56.	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik			
57.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			
58.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran			
		XV	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
59.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	56.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
60.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	57.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
61.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	58.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



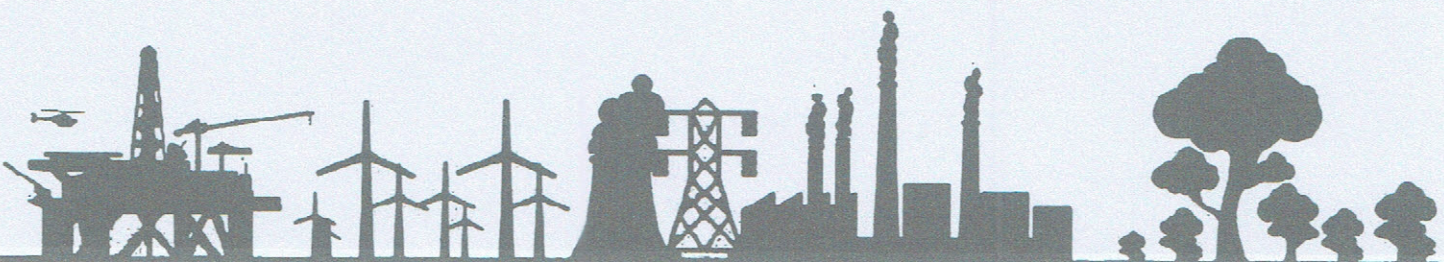
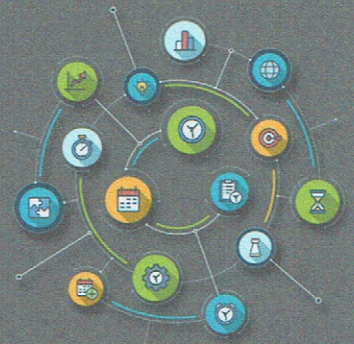
Gambar 6.1 Pohon Kinerja BAPPEDA Tahun 2019-2024 Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020



Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Adapun dalam penentuan indikator dan target yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Lampung 2019-2024 menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk BAPPEDA Provinsi Lampung selama tahun 2019-2024, dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.



BAB VII. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAN URUSAN PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG 2019-2024





Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Perubahan Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran pada Perubahan RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BAPPEDA yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD. Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung sesuai dengan bidang urusan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD, dapat dilihat pada tabel dibawah ini



Tabel 7.1 Perubahan Indikator Kinerja Pembangunan BAPPEDA Provinsi Lampung sesuai bidang urusan yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun ke-					Kondisi Akhir pada Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)
1.	Penetapan RKPD Tepat Waktu;	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	-	30%	30%	30%	31%	32%	32%
3.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	-	80%	85%	90%	95%	95%	95%

Adapun formulasi atau tata cara perhitungan dalam mencapai target dari setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 7.2 Cara Perhitungan Capaian Target Indikator Kinerja Pembangunan BAPPEDA Provinsi Lampung sesuai bidang urusan yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung

No (1)	Indikator Kinerja Utama (IKU) (2)	Cara Perhitungan (Formulasi) (3)
1.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Dihitung berdasarkan Waktu Penetapan RKPD Maksimal 1 minggu setelah RKP ditetapkan
2.	Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	Dihitung berdasarkan Usulan <i>Stakeholder</i> sesuai dengan kewenangan yang diakomodir di RKPD dibagi Jumlah seluruh Usulan <i>Stakeholder</i> yang sesuai kewenangan dikali 100 Persen.
3.	Persentase keselarasan indikator sasaran Renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD	Dihitung berdasarkan Jumlah OPD yang memiliki Indikator sasaran Renstranya selaras dengan Indikator sasaran RPJMD dibagi Jumlah OPD lingkup Provinsi Lampung dikali 100 Persen.
4.	Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD	Dihitung berdasarkan Jumlah Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam RKPD yang dilaksanakan pada APBD dibagi Jumlah seluruh Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam RKPD dikali 100 Persen.
5.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	Dihitung berdasarkan Jumlah capaian Indikator sasaran RPJMD yang diatas 95% dibagi Jumlah seluruh Indikator RPJMD dikali 100 Persen

1.
Penetapan
RKPD Tepat
Waktu

Dihitung berdasarkan Waktu Penetapan RKPD Maksimal 1 minggu setelah RKP ditetapkan.

Indikator sasaran 1 adalah Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD

Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni setiap tahun nya. Adapun Sumber data untuk indikator ini adalah Peraturan Gubernur Lampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Indikator sasaran 2 adalah Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD. Usulan stakeholder ini diakomodir dalam aplikasi E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan

2. Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD

Dihitung berdasarkan Usulan *Stakeholder* sesuai dengan kewenangan yang diakomodir di RKPD dibagi Jumlah seluruh Usulan *Stakeholder* yang sesuai kewenangan dikali 100 Persen.

tersebut dibagi menjadi 3 bagian antara lain : 1) Usulan Masyarakat; 2) Usulan Pokir DPRD dan 3) Usulan Kabupaten/ Kota. Adapun sumber data pada indikator ini di dapat dari 3 usulan yang diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Berita Acara Desk Musrenbang RKPD.

3. Persentase keselarasan indikator sasaran Renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD

Dihitung berdasarkan Jumlah OPD yang memiliki Indikator sasaran Renstranya selaras dengan Indikator sasaran RPJMD dibagi Jumlah OPD lingkup Provinsi Lampung

Indikator sasaran 3 adalah Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD. Capaian kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB Republik Indonesia setiap tahun nya.

Adapun sumber data pada indikator ini di dapat dari Perubahan Renstra OPD dan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Indikator sasaran 4 adalah Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD. Capaian kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB Republik Indonesia setiap tahun nya.

4. Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD

Dihitung berdasarkan Jumlah Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam RKPD yang dilaksanakan pada APBD dibagi Jumlah seluruh Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam RKPD dikali 100 Persen



Adapun sumber data pada indikator ini di dapat dari Pergub RKPD , Perda dan Pergub tentang APBD dan Dokumen Hasil Evaluasi RKPD Tahun Berkenaan.

5.
Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai

Dihitung berdasarkan Jumlah capaian Indikator sasaran RPJMD yang diatas 95% dibagi Jumlah seluruh Indikator RPJMD dikali 100 Persen

Indikator sasaran 5 adalah Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai. Capaian kinerja diukur berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Agenda Kerja Gubernur (AKU) Tahun

berkenaan yang capaian kinerja nya diatas 95%. Capaian kinerja ini merupakan capaian kinerja OPD yang menjadi pengampu disetiap IKU/ AKU Gubernur yang targetnya telah ditetapkan setiap tahun. Adapun sumber data pada indikator ini adalah evaluasi capaian RPJMD setiap tahun nya.

Selain Sasaran Utama yang merupakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat sasaran yang bersifat mendukung pencapaian indikator kinerja strategis BAPPEDA Provinsi Lampung. Sasaran tersebut adalah : Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan serta Sarana. Capaian Sasaran Pendukung tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut :

Indikator sasaran Pendukung

adalah Nilai SAKIP. Indikator ini merupakan indikator rutin atau pendukung pelayanan di BAPPEDA Provinsi Lampung

Nilai SAKIP
(Bappeda)

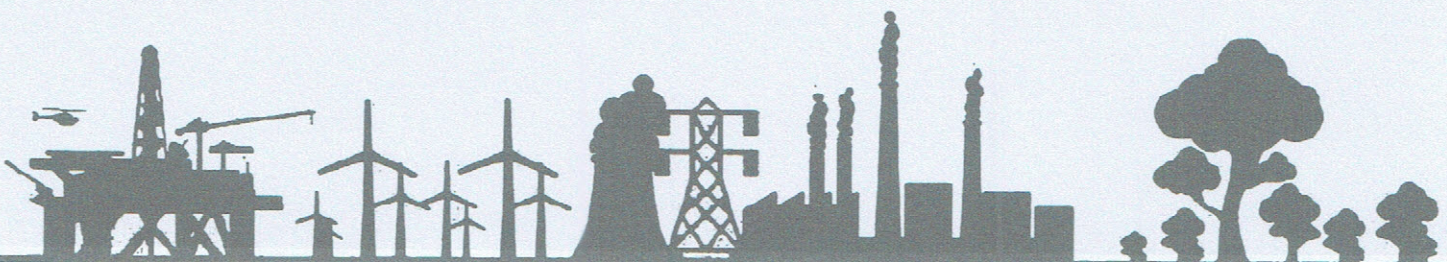
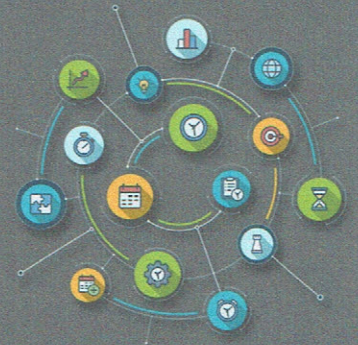
Hasil evaluasi SAKIP Bappeda oleh Inspektorat Provinsi Lampung

yang diukur melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, penyusunan dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan serta aset. Target indikator ini merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai padas setiap tahun nya. Sumber data pada indikator ini merupakan hasil predikat yang didapat melalui Laporang Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing OPD setiap tahunnya.



BAB VII. PENUTUP

PERUBAHAN RENSTRA
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG 2019-2024





Perubahan Rencana Strategis (P Renstra) OPD merupakan panduan kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Perubahan Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Dokumen Perubahan Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) tahunan selama kurun waktu 2020-2024. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. BAPPEDA Provinsi Lampung berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung 2019-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra BAPPEDA, diwajibkan menjabarkan ke dalam Rencana Kerja tahunan;
3. Renstra BAPPEDA merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi RPJMD Provinsi Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Provinsi Lampung.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh` individu BAPPEDA untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Semoga perencanaan strategis yang disusun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 , sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari BAPPEDA Provinsi Lampung.

MATRIK RENSTRA 2019-2024 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2020		2021		2022		2023		2024				TARGET	PAGU
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
SASARAN UTAMA																				
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.			Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu														
					Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	%	75		80		85		90		95					
					Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS	%	100		100		100		100		100					
			4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang															
			4.1		Perencanaan															
			4.1.34		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	1.800.000.000	100	0	100	0	100	0	100	1.800.000.000			
			4.1.34.1		1 Penyusunan dan Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD Murni dan Perubahan	Dokumen	2	300.000.000	0	0	0	0	0	0	2	300.000.000			
			4.1.34.3		3 Pembinaan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dibina terkait perencanaan	OPD	-48	350.000.000	0	0	0	0	0	0	-48	350.000.000			
			4.1.34.4		4 Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	Kali	2	650.000.000	0	0	0	0	0	2	650.000.000				
			4.1.34.5		5 Penyusunan dan Penetapan RPJPD dan RPJMD	Jumlah dokumen RPJPD dan RPJMD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4.1.34.7		7 Koordinasi Regional Pembangunan Antar Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen laporan (Raker Gub, Koneg dan Rakortas Reg. Sumatera)	Dokumen	1	500.000.000	0	0	0	0	0	1	500.000.000				
					Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	%	100		100		100		100		100					
					Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD	%	100		100		100		100		100					
					Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	%	80		85		90		95		95					
			4.1.29		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada Renstra dan Renja OPD bidang ekonomi	%	100	2.700.000.000	100	0	100	0	100	0	100	2.700.000.000			
			4.1.29.1		1 Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pertanian	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/ verifikasi penyusunan renstra dan renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan sektor pertanian, nonan, kelautan dan perikanan)	Dokumen	2	350.000.000	0	0	0	0	0	2	350.000.000				
			4.1.29.2		2 Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Investasi dan Keuangan	Jumlah dokumen Laporan hasil koordinasi/ verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD serta dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan di sektor penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, dan ketenagakerjaan	Dokumen	2	350.000.000	0	0	0	0	0	2	350.000.000				
			4.1.29.3		3 Perencanaan Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Industri, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan UKM	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan renstra dan renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan di sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan)	Dokumen	3	350.000.000	0	0	0	0	3	350.000.000					

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024		TARGET	PAGU				
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)		
			4 1 29	4	Pilot Project Pemberdayaan Masyarakat Miskin (PEMM) dan Kartu Petani Berjaya (KPB)	Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diberdayakan	Kelompok	500	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500	900.000.000			
			4 1 29	5	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Pertanian	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan	Dokumen	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000			
			4 1 29	6	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Ekonomi Makro, Investasi dan Keuangan	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di sektor penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, dan keuangan	Dokumen	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000			
			4 1 29	7	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Industri Perdagangan dan Pariwisata	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan	Dokumen	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000			
			4 1 30		Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada renstra dan renja OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	100	3.250.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	3.250.000.000			
			4 1 30	1	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Manusia	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan) di sektor Pembangunan Sumberdaya Manusia	Dokumen	2	550.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	550.000.000			
			4 1 30	2	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan) di Sektor Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	2	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	350.000.000			
			4 1 30	3	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan) di sektor Pemerintahan	Dokumen	2	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	350.000.000			
			4 1 30	4	Pilot Project Pembangunan "Smart Village"	Jumlah desa yang difasilitasi sebagai Pilot Project	Desa	30	1.250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1.250.000.000			
			4 1 30	5	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Sumberdaya Manusia	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di sektor pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsifan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dokumen	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000			
			4 1 30	6	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di Sektor Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000			
			4 1 30	7	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di sektor Pemerintahan	Dokumen	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000			
			4 1 31		Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada Renstra dan Renja OPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100	3.200.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	3.200.000.000			
			4 1 31	1	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan renstra dan renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan) di sektor pekerjaan umum dan perataan ruang, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, dan penelitian dan pengembangan	Dokumen	2	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	350.000.000			

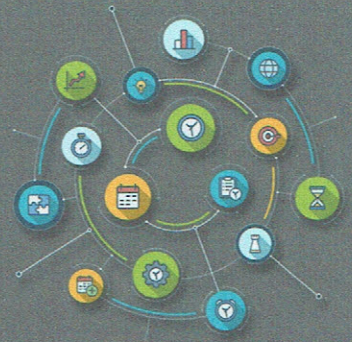
NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024		2025		TARGET	PAGU		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)								
			4 1 31	2	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan SDA dan LH	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di sektor SDA dan LH	Dokumen	2	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	350.000.000			
			4 1 31	3	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Tatauang dan Kawasan Pemukiman	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan renstra dan renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan) di sektor perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, kominfo, persandian dan statistik, dan perencanaan	Dokumen	2	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.000.000.000			
			4 1 31	4	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Infrastruktur	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, dan penelitian dan pengembangan	Dokumen	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000			
			4 1 31	5	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan SDA dan LH	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di sektor SDA dan LH	Dokumen	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000			
			4 1 31	6	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Tatauang dan Kawasan Pemukiman	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di sektor perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, kominfo, persandian dan statistik, dan perencanaan	Dokumen	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000			
			4 1 31	7	Penunjang Program IPDMIP (Integrated Partcipacy Developmet And Management Irrigation Project)	Jumlah dokumen (Laporan hasil pelaksanaan Program IPDMIP)	Dokumen	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000			
			4 1 32		Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja OPD dan Kabupaten/Kota	%	100	1.300.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	1.300.000.000			
			4 1 32	1	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD	Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring	Buku	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000			
			4 1 32	2	Evaluasi Capaian Kinerja RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah dokumen evaluasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Dokumen	2	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	450.000.000			
			4 1 32	3	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKPD dan RKPD Perubahan Kab/ Kota	Dokumen	3	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	400.000.000			
			4 1 32	5	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat	Jumlah laporan Deksy TP/ DAK dan laporan monitoring	Dokumen	2	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	200.000.000			
			4 1 33		Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan	Persentase ketersediaan data capaian per prioritas pembangunan	%	100	1.350.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	1.350.000.000			
			4 1 33	2	Pengolahan dan Analisis Data Geospasial Untuk Perencanaan	Jumlah informasi Geospasial Tematik	Peta	100	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	350.000.000			
			4 1 33	3	Pengembangan Perustakaan Kabupaten Provinsi Lamounga	Jumlah layanan pengelolaan bahan pustaka E-Book	Buah	175	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175	200.000.000			
			4 1 33	4	Pengolahan dan Analisis Data Informasi Perencanaan	Jumlah ketersediaan E-Database dan Sikurtaas	%	80	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80	600.000.000			
			4 1 33	5	Pengelolaan Simpul Jaringan Data Sosial Nasional	Jumlah Upload Informasi Portal Satu Data Provinsi Lamounga	Data	100	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	200.000.000			
		Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA			Nilai SAKIP BAPPEDA	Nilai	BB			BB		BB		A		A						
			4 1 1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan administrasi perkantoran	%	100	2.593.200.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	2.593.200.000			
			4 1 1 1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	620.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	620.000.000			
			4 1 1 2		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah layanan administrasi keuangan	Bulan	12	285.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	285.000.000			
			4 1 1 3		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	Bulan	12	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	170.000.000			
			4 1 1 4		Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	65.000.000			
			4 1 1 5		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan ATK	Bulan	12	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	65.000.000			
			4 1 1 6		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetak dan pengandaan	Bulan	12	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	60.000.000			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024		TARGET	PAGU				
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)								
			4.1.1	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	350.000.000			
			4.1.1	8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Bulan	12	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	35.000.000			
			4.1.1	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	35.000.000			
			4.1.1	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah layanan makan minum	Bulan	12	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	45.000.000			
			4.1.1	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Kali	96	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	96	400.000.000			
			4.1.1	12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang diterima	Orang	6	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6	120.000.000			
			4.1.1	13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga PTHL yang gajinya terbayarkan	Orang	11	343.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11	343.200.000			
			4.1.2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Anatarur	Persentase sarana dan prasarana kantor yang tersedia dan terpelihara	%	100	2.351.800.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	2.351.800.000			
			4.1.2	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Unit	1	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	700.000.000			
			4.1.2	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	35	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35	500.000.000			
			4.1.2	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Paket	4	676.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	676.800.000			
			4.1.2	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	17	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17	400.000.000			
			4.1.2	5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Paket	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	75.000.000			
			4.1.3		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase capaian kapasitas kelembagaan perangkat daerah	%	100	715.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	715.000.000			
			4.1.3	1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti bintek, dan sosialisasi	Orang	100	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	200.000.000			
			4.1.3	2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan	%	95	190.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	98	190.000.000			
			4.1.3	3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah pelayanan informasi publik	Paket	20	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	200.000.000			
			4.1.3	4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas Pdaawal Bapoda	Stel	150	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150	125.000.000			
			4.1.4		Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset yang tepat waktu	%	100	1.350.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	1.350.000.000			
			4.1.4	1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja (LKJ, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Ev. Renstra, UPRD/LKPP)	Dokumen	5	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	250.000.000			
			4.1.4	2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD	Dokumen	2	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	175.000.000			
			4.1.4	3	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Rencana Aksi)	Dokumen	6	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6	275.000.000			
			4.1.4	4	Pengembangan e-Government OPD dan Puskas Pembangunan	Jumlah arsip digital dokumen perencanaan Rappeda	Dokumen	10	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10	600.000.000			
			4.1.4	5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset	Dokumen	3	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	50.000.000			
TOTAL								20.610.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.610.000.000				



LAMPIRAN II

KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020



Matrik Perubahan Renstra 2019-2024 Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

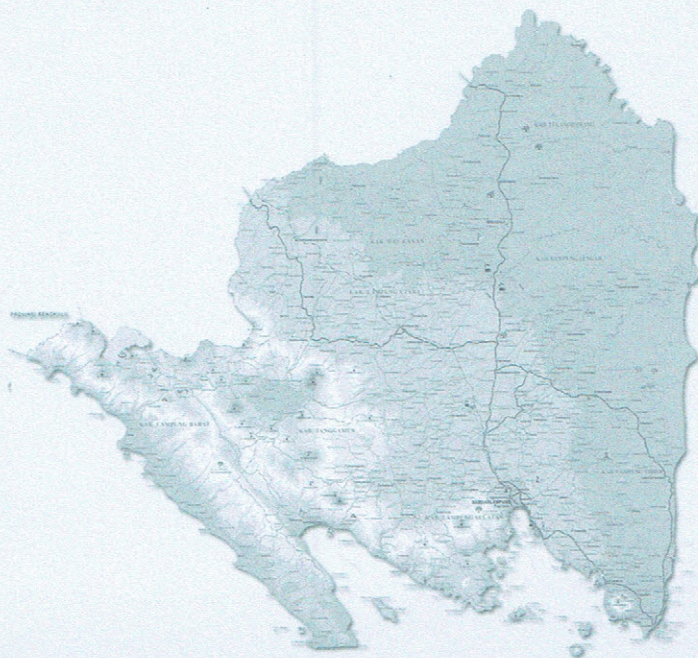
NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024		K	PAGU		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
SASARAN UTAMA																				
1	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.			Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu													
					Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	%	30		30		30		31		32		32			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5					PERENCANAAN															
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	%	0	100	2.545.497.400	100	0	100	0	100	0	2.545.497.400			
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	0	100	1.087.946.500	0	0	0	0	0	0	1.087.946.500			
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina terkait perencanaan	OPD	0	0	48	84.960.000	0	0	0	0	0	9,6	84.960.000	Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi	Lampung
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	Kali	0	0	1	505.034.500	0	0	0	0	0	1	505.034.500	Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi	Lampung
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKPD Murni dan Perubahan, Dokumen RPJPD dan RPJMD	Dokumen	0	0	2	497.952.000	0	0	0	0	0	2	497.952.000	Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi	Lampung
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	%	0	100	838.126.000	0	0	0	0	0	0	838.126.000			
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah keterisian E-Database n-1	%	0	70	115.472.000	0	0	0	0	0	70	115.472.000	UPTD Pusdatinbangda	Lampung	
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Upload Informasi Geospasial Tematik pada Aplikasi Geoportall Satu Peta Provinsi Lampung	Peta	0	0	50	253.814.000	0	0	0	0	50	253.814.000	UPTD Pusdatinbangda	Lampung	
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pembinaan Kabupaten/ Kota terkait Satu Data Provinsi Lampung	Kab/ Kota	0	0	15	97.846.000	0	0	0	0	15	97.846.000	UPTD Pusdatinbangda	Lampung	
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Publikasi Data Pembangunan Daerah	Publikasi	0	0	6	368.994.000	0	0	0	0	6	368.994.000	UPTD Pusdatinbangda	Lampung	
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	%	0	100	621.424.900	0	0	0	0	0	0	621.424.900			
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan Dekon/ TP/DAK dan laporan monitoring	Dokumen	0	0	2	63.233.000	0	0	0	0	2	63.233.000	Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi	Lampung	
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring dan Dokumen Evaluasi RKPD dan Evaluasi	Buku	0	0	3	330.260.500	0	0	0	0	3	330.260.500	Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi	Lampung	
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKPD dan RKPD Perubahan Kab/ Kota	Dokumen	0	0	3	227.931.400	0	0	0	0	3	227.931.400	Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi	Lampung	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024		K	PAGU				
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)								
		Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi			Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	%	100		100		100		100		100		100					
					Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD.	%	100		100		100		100		100		100					
					Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	%	80		85		90		95		95		95					
			5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan movev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	%	0	0	100	4.337.148.100	100	0	100	0	100	0	4.337.148.100					
			5 01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	0	0	100	1.413.505.500	0	0	0	0	0	0	1.413.505.500					
			5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan) di Bidang Pemerintahan	Dokumen	0	0	1	393.385.700	0	0	0	0	0	1	393.385.700	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung			
			5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan	Dokumen	0	0	1	339.098.800	0	0	0	0	0	1	339.098.800	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung			
			5 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di Bidang Pemerintahan	Dokumen	0	0	1	346.815.100	0	0	0	0	0	1	346.815.100	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung			
			5 01 03 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan) di Bidang Kesejahteraan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung			
			5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan) di Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	0	0	1	39.861.200	0	0	0	0	0	1	39.861.200	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung			
			5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Proceeding FGD terkait pembangunan di Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	0	0	1	236.071.000	0	0	0	0	0	1	236.071.000	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung			
			5 01 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	0	0	1	58.273.700	0	0	0	0	0	1	58.273.700	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung			
			5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung			
			5 01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA	%	0	0	100	1.071.472.800	0	0	0	0	0	0	1.071.472.800					
			5 01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Laporan hasil koordinasi/ verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD serta dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan di Bidang	Dokumen	0	0	1	170.034.000	0	0	0	0	0	1	170.034.000	Perencanaan Perekonomian	Lampung			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024		K	PAGU		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
							(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(14)	(15)		
			5 01 03 1.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Perekonomian	Dokumen	0	0	0 1	128.908.000	0	0	0 0	0 0	0 0	0 1	128.908.000	Perencanaan Perekonomian	Lampung	
			5 01 03 1.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di Bidang Perekonomian	Dokumen	0	0	0 1	235.643.000	0	0	0 0	0 0	0 0	0 1	235.643.000	Perencanaan Perekonomian	Lampung	
			5 01 03 1.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Laporan hasil koordinasi/ verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD serta dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan di Bidang	Dokumen	0	0	0 1	172.945.700	0	0	0 0	0 0	0 0	0 1	172.945.700	Perencanaan Perekonomian	Lampung	
			5 01 03 1.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Laporan hasil koordinasi/ verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD serta dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan di Bidang	Dokumen	0	0	0 1	44.098.000	0	0	0 0	0 0	0 0	0 1	44.098.000	Perencanaan Perekonomian	Lampung	
			5 01 03 1.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen	0	0	0 1	86.580.000	0	0	0 0	0 0	0 0	0 1	86.580.000	Perencanaan Perekonomian	Lampung	
			5 01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen	0	0	0 1	209.509.000	0	0	0 0	0 0	0 0	0 1	209.509.000	Perencanaan Perekonomian	Lampung	
			5 01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di Bidang Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	0 1	23.754.900	0	0	0 0	0 0	0 0	0 1	23.754.900	Perencanaan Perekonomian	Lampung	
			5 01 03 1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	0	0	0 100	1.852.170.000	0	0	0 0	0 0	0 0	0	1.852.170.000			
			5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Laporan hasil koordinasi/ verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD serta dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan di Bidang	Dokumen	0	0	0 1	990.312.500	0	0	0 0	0 0	0 0	0 1	990.312.500	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung	
			5 01 03 1.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Laporan hasil koordinasi/ verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD serta dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan di Bidang	Dokumen	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung	
			5 01 03 1.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di Bidang Infrastruktur	Dokumen	0	0	0 1	28.306.000	0	0	0 0	0 0	0 0	0 1	28.306.000	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung	
			5 01 03 1.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di Bidang Sumber Daya Air dan	Dokumen	0	0	0 1	120.748.500	0	0	0 0	0 0	0 0	0 1	120.748.500	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung	
			5 01 03 1.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Laporan hasil koordinasi/ verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD serta dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan di Bidang	Dokumen	0	0	0 1	346.148.000	0	0	0 0	0 0	0 0	0 1	346.148.000	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung	
			5 01 03 1.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Kewilayahan	Dokumen	0	0	0 1	209.549.500	0	0	0 0	0 0	0 0	0 1	209.549.500	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung	
			5 01 03 1.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di Bidang Kewilayahan	Dokumen	0	0	0 1	157.105.500	0	0	0 0	0 0	0 0	0 1	157.105.500	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung	
			5 01 03 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di Bidang Sumber Daya Air dan	Dokumen	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024		K	PAGU		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(12)	(12)	(14)	(15)					
		Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi			Nilai SAKIP	Nilai	BB		BB		A		A		A					
			5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	0	0	100	23.848.419.682	0	0	0	0	0	100	23.848.419.682			
			5 01 01 1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu	%	0	0	100	341.892.000	0	0	0	0	0	100	341.892.000			
			5 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi, PK Murni, PK Perubahan, Renja	Dokumen	0	0	12	195.296.000	0	0	0	0	0	12	195.296.000	Sekretariat/ Program	Lampung	
			5 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, LPPD/LKPJ, Evaluasi Hasil Renja Triwulan, Evaluasi Renja	Dokumen	0	0	10	146.596.000	0	0	0	0	0	10	146.596.000	Sekretariat/ Program	Lampung	
			5 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Keuangan yang tepat waktu	%	0	0	100	14.035.221.132	0	0	0	0	0		14.035.221.132			
			5 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	0	0	12	13.932.797.132	0	0	0	0	0	12	13.932.797.132	Sekretariat/ Keuangan dan Aset	Lampung	
			5 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD	Dokumen	0	0	2	102.424.000	0	0	0	0	0	2	102.424.000	Sekretariat/ Keuangan dan Aset	Lampung	
			5 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			5 01 01 1.03 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat/ Keuangan dan Aset	Lampung	
			5 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah	%	0	0	100	295.322.600	0	0	0	0	0		295.322.600			
			5 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	0	0	150	120.150.000	0	0	0	0	0	150	120.150.000	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung	
			5 01 01 1.05 06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Orang	0	0	30	175.172.600	0	0	0	0	0	30	175.172.600	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung	
			5 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum	%	0	0	100	6.152.399.800	0	0	0	0	0		6.152.399.800			
			5 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	0	0	60	1.486.722.800	0	0	0	0	0	60	1.486.722.800	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung	
			5 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah layanan penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Bulan	0	0	12	10.000.000	0	0	0	0	0	12	10.000.000	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung	
			5 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah layanan barang cetak dan pengandaan	Bulan	0	0	12	32.392.800	0	0	0	0	0	12	32.392.800	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung	
			5 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah layanan pengadaan ATK	Bulan	0	0	12	47.000.000	0	0	0	0	0	12	47.000.000	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung	
			5 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makan minum	Bulan	0	0	12	61.600.000	0	0	0	0	0	12	61.600.000	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung	
			5 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Kali	0	0	300	4.514.684.000	0	0	0	0	0	300	4.514.684.000	Sekretariat/ Keuangan dan Aset	Lampung	
			5 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	0	0	100	129.213.000	0	0	0	0	0		129.213.000			
			5 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung	
			5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	0	0	25	129.213.000	0	0	0	0	0	25	129.213.000	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2020		2021		2022		2023		2024				K	PAGU
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
			5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	%	0	0	100	2.012.917.000	0	0	0	0	0	2.012.917.000				
			5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	0	0	12	424.000.000	0	0	0	0	0	424.000.000	Sekretariat/Keuangan dan Aset	Lampung		
			5 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja	Bulan	0	0	12	62.675.000	0	0	0	0	0	62.675.000	Sekretariat/Umum dan Kepegawaian	Lampung		
			5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi keuangan dan layanan umum kantor	Bulan	0	0	12	1.526.242.000	0	0	0	0	0	1.526.242.000	Sekretariat/Umum dan Kepegawaian	Lampung		
			5 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	%	0	0	100	881.454.350	0	0	0	0	0	881.454.350				
			5 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	0	0	17	324.918.000	0	0	0	0	0	324.918.000	Sekretariat/Umum dan Kepegawaian	Lampung		
			5 01 01 1.09 03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Unit	0	0	50	45.320.000	0	0	0	0	0	45.320.000	Sekretariat/Umum dan Kepegawaian	Lampung		
			5 01 01 1.09 03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Paket	0	0	3	511.216.350	0	0	0	0	0	511.216.350	Sekretariat/Umum dan Kepegawaian	Lampung		
TOTAL								0		30.731.065.182		0		0		30.731.065.182				



LAMPIRAN III

KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021



MATRIK PERUBAHAN RENSTRA 2019-2024 BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024		K	PAGU		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)					
SASARAN UTAMA																				
1	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.			Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu													
					Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	%	30		30		30		31		32		32			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5					PERENCANAAN															
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	%	0	0	0	100	4.728.862.100	100	5.445.398.310	100	7.480.936.141	17.662.168.551			
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	0	0	0	100	1.246.490.000	100	1.682.000.000	100	3.360.200.000	6.288.890.000			
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	Berita Acara	0	0	0	1	190.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	652.000.000	Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi	Lampung	
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	0	0	0	1	400.000.000	1	517.000.000	1	568.700.000	1.485.700.000	Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi	Lampung	
5	01	02	1.01	05	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi yang ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	Dokumen	0	0	0	2	656.490.000	2	945.000.000	4	2.549.500.000	4.150.950.000	Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi	Lampung	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	%	0	0	0	100	1.883.844.000	100	1.872.228.400	100	1.979.481.240	5.735.523.640			
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	Masukan	0	0	0	3	189.198.500	3	222.028.400	3	244.231.240	655.458.140	UPTD Pustatinbangda	Lampung	
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Orang	0	0	0	75	708.427.500	75	605.000.000	75	665.500.000	1.978.927.500	UPTD Pustatinbangda	Lampung	
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan	Orang	0	0	0	60	240.518.000	60	238.700.000	60	262.570.000	741.788.000	UPTD Pustatinbangda	Lampung	
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan	Buku	0	0	0	2	745.700.000	2	808.500.000	2	807.150.000	2.359.350.000	UPTD Pustatinbangda	Lampung	
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	%	0	0	0	100	1.446.518.100	100	1.581.169.810	100	1.750.286.901	4.787.974.911			
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Laporan	0	0	0	2	296.650.900	2	326.205.990	2	356.826.589	981.583.479	Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi	Lampung	
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Laporan	0	0	0	3	643.750.000	3	708.125.000	3	778.937.500	2.130.812.500	Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi	Lampung	
5	01	02	1.03	04	Facilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota yang difasilitasi/ evaluasi	Dokumen	0	0	0	3	506.217.200	3	566.838.920	3	612.522.812	1.675.578.932	Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi	Lampung	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2020		2021		2022		2023		2024				K	PAGU
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
			5 01 02 1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	%	0	0	0	0	0	150.000.000	0	300.000.000	0	400.000.000		850.000.000		
			5 01 02 1.04 01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	Dokumen	0	0	0	1	50.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	3	300.000.000	UPTD Pseudatinbangda	Lampung	
			5 01 02 1.04 02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	0	0	0	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	250.000.000	Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi	Lampung	
			5 01 02 1.04 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen	0	0	0	1	50.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	3	300.000.000	UPTD Pseudatinbangda	Lampung	
		Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi			Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	%	100		100		100		100		100		100			
					Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	%	100		100		100		100		100		100			
					Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	%	80		85		90		95		95		95			
			5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	%	0	0	0	100	7.353.718.600	100	7.539.090.480	100	8.292.699.506		23.185.808.566			
			5 01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	0	0	0	100	2.185.600.000	100	2.160.160.000	100	2.381.576.000		6.727.336.000			
			5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0	0	0	1	300.000.000	1	355.850.000	1	391.435.000	3	1.047.285.000	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung	
			5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	0	0	0	10	220.000.000	10	199.650.000	10	219.615.000	30	639.265.000	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung	
			5 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	0	0	0	10	265.000.000	10	222.750.000	10	245.025.000	30	732.775.000	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung	
			5 01 03 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	0	0	0	1	150.000.000	1	331.850.000	1	340.435.000	3	822.285.000	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung	
			5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0	0	0	1	500.000.000	1	404.910.000	1	445.401.000	3	1.350.311.000	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung	
			5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	0	0	0	6	200.000.000	6	199.650.000	6	219.615.000	18	619.265.000	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung	
			5 01 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	0	0	0	6	244.948.200	6	222.750.000	6	275.025.000	18	742.723.200	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2020		2021		2022		2023		2024				K	PAGU
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
			5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	0	0	0	0	1	305.651.800	1	222.750.000	1	245.025.000	3	773.426.800	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung
			5 01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA	%	0	0	0	100	2.214.988.800	100	2.326.465.460	100	2.559.112.006		7.100.546.056			
			5 01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0	0	0	1	370.256.300	1	404.877.110	1	445.364.821	3	1.220.498.231	Perencanaan Perekonomian	Lampung	
			5 01 03 1.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	0	0	0	5	301.778.400	5	339.105.140	5	373.016.854	15	1.013.899.194	Perencanaan Perekonomian	Lampung	
			5 01 03 1.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	0	0	0	5	210.961.800	5	328.955.880	5	361.851.468	15	901.768.948	Perencanaan Perekonomian	Lampung	
			5 01 03 1.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	0	0	0	1	306.197.900	1	154.672.540	1	170.139.794	3	631.010.234	Perencanaan Perekonomian	Lampung	
			5 01 03 1.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0	0	0	1	229.003.200	1	198.850.500	1	216.535.550	3	642.389.250	Perencanaan Perekonomian	Lampung	
			5 01 03 1.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	0	0	0	4	300.408.400	4	187.440.000	4	206.184.000	12	694.032.400	Perencanaan Perekonomian	Lampung	
			5 01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	0	0	0	4	202.672.000	4	395.323.500	4	434.855.850	12	1.032.851.350	Perencanaan Perekonomian	Lampung	
			5 01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	0	0	0	1	293.690.800	1	319.240.790	1	351.164.869	3	964.096.459	Perencanaan Perekonomian	Lampung	
			5 01 03 1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	0	0	0	100	2.953.150.000	100	3.052.466.000	100	3.352.311.500		9.357.926.500			
			5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0	0	0	1	565.125.900	1	628.368.600	1	693.205.460	3	1.886.699.960	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung	
			5 01 03 1.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	0	0	0	4	500.000.000	4	165.000.000	4	181.500.000	12	646.500.000	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung	
			5 01 03 1.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	0	0	0	4	202.500.000	4	222.750.000	4	245.025.000	12	670.275.000	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung	
			5 01 03 1.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	0	0	0	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	3	600.765.000	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung	
			5 01 03 1.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kewilayahan yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0	0	0	1	619.424.100	1	690.650.000	1	758.315.000	3	2.068.389.100	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung	
			5 01 03 1.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	0	0	0	5	182.100.000	5	199.650.000	5	219.615.000	15	601.365.000	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-																KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024		K	PAGU								
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)									
			5 01 03 1.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	0	0	0	0	5	202.500.000	5	222.750.000	5	245.025.000	16	670.275.000	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung						
			5 01 03 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	0	0	0	1	500.000.000	1	723.646.400	1	790.011.040	3	2.013.657.440	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung							
		Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi			Nilai SAKIP	Nilai	BB		BB		BB		A		A		A									
			5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	0	0	0	100	20.650.494.482	100	21.120.336.653	100	23.394.530.811	100	65.165.361.946									
			5 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu	%	0	0	0	100	587.978.000	100	646.773.800	100	711.450.960	100	1.946.200.560									
			5 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	0	0	0	11	353.189.000	11	388.507.900	12	427.358.690	34	1.169.055.580	Sekretariat/ Program	Lampung							
			5 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	0	0	0	7	234.787.000	7	258.265.700	7	284.092.270	21	777.144.970	Sekretariat/ Program	Lampung							
			5 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Keuangan yang tepat waktu	%	0	0	0	100	15.597.399.400	100	16.807.611.800	100	18.369.393.661		50.574.374.861									
			5 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	0	0	0	115	15.494.945.400	115	16.494.945.400	115	18.245.480.621	345	50.235.361.421	Sekretariat/ Keuangan dan Aset	Lampung							
			5 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	2	102.424.000	2	112.666.400	2	123.933.040	6	339.023.440	Sekretariat/ Keuangan dan Aset	Lampung							
			5 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	%	0	0	0	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000		182.050.000									
			5 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	3	55.000.000	3	60.500.000	3	66.550.000	9	182.050.000	Sekretariat/ Keuangan dan Aset	Lampung							
			5 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah	%	0	0	0	100	266.033.040	100	297.391.040	100	266.200.000		829.624.060									
			5 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0	0	0	130	139.750.000	130	132.000.000	130	145.200.000	390	416.950.000	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung							
			5 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0	0	0	30	126.283.040	30	165.391.040	30	121.000.000	90	412.674.050	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung							
			5 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	%	0	0	0	100	915.343.642	100	868.687.446	100	1.020.556.191		2.804.587.279									
			5 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	0	0	12	438.112.000	12	350.000.000	12	450.000.000	36	1.238.112.000	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung							
			5 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	0	0	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.100.000	36	33.100.000	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung							
			5 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	0	0	0	12	16.580.000	12	22.000.000	12	24.200.000	36	62.780.000	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung							
			5 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	0	0	0	12	19.953.950	12	33.039.985	12	36.343.984	36	89.337.919	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung							
			5 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	0	0	0	1	79.200.000	1	66.000.000	1	72.600.000	3	217.800.000	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung							
			5 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	1	351.497.692	1	386.647.461	1	425.312.207	3	1.163.457.361	Sekretariat/ Keuangan dan Aset	Lampung							
			5 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	0	0	0	100	747.723.000	100	141.900.000	100	156.090.000		1.045.713.000									
			5 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat/ Umum dan Kepegawaian	Lampung						

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB	LOKASI												
							2020		2021		2022		2023		2024				K	PAGU										
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)																
			5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	0	25	747.723.000	25	141.900.000	25	156.090.000	75	1.045.713.000	Sekretariat/Umum dan Kepegawaian	Lampung										
			5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	%	0	0	0	0	100	1.861.383.800	100	1.477.373.800	100	1.529.513.800		4.666.251.400												
			5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	0	0	0	0	1	424.000.000	1	466.400.000	1	513.040.000	3	1.403.440.000	Sekretariat/Keuangan dan Aset	Lampung										
			5 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0	0	0	0	1	27.790.000	1	55.000.000	1	60.500.000	3	143.290.000	Sekretariat/Umum dan Kepegawaian	Lampung										
			5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	0	0	0	0	1	1.209.573.800	1	955.973.800	1	955.973.800	3	3.121.521.400	Sekretariat/Umum dan Kepegawaian	Lampung										
			5 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	%	0	0	0	0	100	819.885.600	100	1.020.088.967	100	1.274.776.199		3.114.560.766												
			5 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	0	0	0	0	13	341.570.000	14	350.000.000	14	289.190.000	41	990.760.000	Sekretariat/Umum dan Kepegawaian	Lampung										
			5 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	250	21.778.600	250	44.000.000	250	48.400.000	750	114.178.600	Sekretariat/Umum dan Kepegawaian	Lampung										
			5 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	3	456.337.000	3	626.098.967	3	937.186.199	9	2.019.622.168	Sekretariat/Umum dan Kepegawaian	Lampung										
TOTAL												0						32.731.065.182		34.104.825.423					39.177.468.458			105.163.359.063		